



## **LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN**

**Pemberantasan Judi Online melalui Literasi Ekonomi Berbasis Gerakan  
Anti Judi Online Terintegrasi dengan Kolaborasi Masyarakat (AKSI  
KOMPAK) Dalam rangka Mendukung Pemberantasan Kemiskinan di  
Kabupaten Muara Enim**

**Disusun Oleh:**

<b>NAMA</b>	<b>: SHOFYAN ARIPANCA, S.KOM,.M.SI.</b>
<b>NDH</b>	<b>: 32</b>
<b>JABATAN PESERTA</b>	<b>: KEPALA DINAS</b>
<b>INSTANSI</b>	<b>: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKABUPATEN MUARA ENIM</b>
<b>NAMA MENTOR</b>	<b>: Ir. YULIUS, M.Si.</b>
<b>JABATAN MENTOR</b>	<b>: SEKRETARIS DAERAH</b>
<b>INSTANSI</b>	<b>: PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM</b>
<b>COACH</b>	<b>: LUKMANSYAH, S.E., M.T.</b>

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II  
ANGKATAN XXXVII  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



## LEMBAR PERSETUJUAN

### IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

#### PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXXVII BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

NAMA : SHOFYAN ARIPANCA, S.KOM.,M.SI.,  
NIP : 197201221997031003  
NDH : 32  
JABATAN : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN MUARA ENIM  
INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN MUARA

#### Pemberantasan Judi Online melalui Literasi Ekonomi Berbasis Gerakan Anti Judi Online Terintegrasi dengan Kolaborasi Masyarakat (AKSI KOMPAK) Dalam rangka Mendukung Pemberantasan Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim

Dinyatakan disetujui untuk diseminarkan

Hari: Kamis, Tanggal 19 Desember 2024 Tempat Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, 19 Desember 2024

Menyetujui,

COACH

**LUKMANSYAH, SE., M.T.**

NIP. 196901051991121001

Mentor

**Ir. YULIUS, M.Si**

NIP. 196707101993031010



## LEMBAR PENGESAHAN

### IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

#### PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXXVII BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

NAMA : SHOFYAN ARIPANCA, S.KOM.,M.SI.  
NIP : 197201221997031003  
NDH : 32  
JABATAN : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN MUARA ENIM  
INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN MUARA

#### **Pemberantasan Judi Online melalui Literasi Ekonomi Berbasis Gerakan Anti Judi Online Terintegrasi dengan Kolaborasi Masyarakat (AKSI KOMPAK) Dalam rangka Mendukung Pemberantasan Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim**

Dinyatakan telah diseminarkan dan disempurnakan sesuai arahan oleh Penguji dan  
Narasumber, Mentor, Coach pada Hari: Kamis, tanggal 19 Desember 2024, Tempat Badan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumatera Selatan

Mengesahkan,

Mengetahui,  
COACH

**LUKMANSYAH, SE., M.T.**  
NIP. 196901051991121001

Disetujui oleh  
Penguji

**Ir. H NOVIAN ASWARDANI, S.T., M.M.,**  
**IPM. ASEAN. Eng**  
NIP. 19751125199031004

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Daerah Kabupaten Sumatera Selatan

**Prof. Dr. H. M. Edwar Juliarta, S.Sos. M.M**  
NIP. 197507071997031003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Proyek Perubahan “Strategi peningkatan literasi masyarakat dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui AKSI KOMPAK (Anti judi Online Terintegrasi dengan Kolaborasi Masyarakat) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim”.

Project leader menyadari bahwa rancangan proyek perubahan ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari aspek redaksi maupun substansi, karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari semua pihak demi kesempurnaan rancangan proyek perubahan. Namun demikian walaupun tidak terlepas dari berbagai kendala yangakhirnya dapat diselesaikan dengan bantuan dan dukungan berbagai pihak yang sangat besar manfaatnya bagi project leader, oleh karenanya leader aksi perubahan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Pj Bupati Muara Enim, Bapak Henky Putrawan, S.Pt., M.Si., M.M. yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional II ini sekaligus selaku Mentor;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara, Bapak Dr. Adi Suryanto, M.Si yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Tahun 2024;
3. Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Prof.Dr.H.M. Edwar Juliarta, S.Sos., M.M. yang telah memberikan seluruh yang terbaik untuk terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Tahun 2024.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, Bapak Ir. Yulius, M.Si sebagai mentor Pemerintah Kabupaten Muara Enim
5. Widyaswara BPSDM Provinsi Lampung selaku coach, Bapak Lukmansyah, S.E., M.T. atas segala dukungan, saran, masukan dan kritiknya kepada leader aksi perubahan selama penyusunan rancangan aksi perubahan;

6. Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim.
7. Keluarga Tercinta, Istri, anak dan keluarga besar atas doa dan dukungan moril selama leader aksi perubahan mengikuti program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan XXXVII Tahun 2024
8. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Tahun 2024, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan Saya, semoga rancangan proyek perubahanan ini dapat bermanfaat baik bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta masyarakat.

Muara Enim,     Oktober 2024  
Project Leader,

**H.SHOFYAN ARIPANCA,S.Kom., M.Si.**

## DAFTAR SI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
EXECUTIVE SUMMARY .....	viii
DESKRIPSI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan dan Manfaat untuk Organisasi Adaptif .....	9
1.3. Output dan Outcome .....	13
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN .....	18
2.1. Deskripsi Proyek Perubahan .....	18
2.1.1. Identifikasi Masalah .....	18
2.1.2. Kondisi Ideal yang diharapkan.....	21
2.1.3. Terobosan/Inovasi.....	22
2.2. Tahapan Perubahan/Milestone Rencana Strategis.....	25
2.3. Analisis Stakeholder dan Rencana Strategi Marketing .....	28
2.3.1. Analisis Stakeholder dan Pemanfaatan Sumberdaya Organisasi .....	28
2.3.2. Strategi Marketing .....	33
2.4. Identifikasi Potensi Risiko dan Solusinya.....	37
2.5. Faktor Kunci Keberhasilan .....	40
2.6. Rencana Mata Pelatihan Mendukung Proyek Perubahan.....	41
2.7. Tata Kelola Proyek Perubahan.....	44
2.8. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana StrategiPengembangan Potensi Diri.....	48

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN.....	51
3.1 Capaian Hasil Perubahan.....	51
3.2 Kepemimpinan Strategis.....	60
3.3 Implementasi Strategi Marketing.....	62
3.4 Keberlanjutan Proyek Perubahan.....	65
3.5 Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran.....	66
3.6 Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan.....	67
BAB III PENUTUP.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 – 2023.....	6
Tabel 2 Sasaran Jangka Menengah Renstra Perpustakaan Nasional 2019 – 2024 .....	6
Tabel 3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 – 2023.....	7
Tabel 4 Indek IPLM, TGM, dan ILK Kabupaten Muara Enim dan Nasional	8
Tabel 5 Analisis Isu Strategis dengan Metode ASTRID.....	21
Tabel 6 Kondisi Ideal yang diharapkan .....	22
Tabel 7 Analisis SWOT Indeks Literasi dan TGM masih di bawah Indeks Nasional .....	23
Tabel 8 Tahapan dan Milestone Proyek Perubahan.....	25
Tabel 9 Kriteria Inovasi .....	26
Tabel 10 Identifikasi Stakholder .....	28
Tabel 11 Strategi Komunikasi 4 kuadran.....	32
Tabel 12 Strategi Komunikasi .....	33
Tabel 13 Strategi marketing 7P+1C Proyek Perubahan .....	35
Tabel 14 Identifikasi Potensi Risiko dan Solusinya.....	37
Tabel 15 Mata Pelatihan Pendukung Proyek Perubahan .....	42
Tabel 16 Tata Kelola Proyek Perubahan.....	44
Tabel 17 Strategi Pengembangan Kompetensi .....	49
Tabel 18 Capaian Tahapan Proyek Perubahan Jangka Pendek .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Fikir Penulisan .....	27
Gambar 2 Peta Stakeholder Proyek Perubahan .....	34
Gambar 3 Rekap Nilai Sikap Perilaku Peserta .....	34
Gambar 4 Rapat Internal .....	51
Gambar 5 Rapat antar Sektor .....	52
Gambar 6 Penyerahan SK Tim Inovasi.....	52
Gambar 7 Pelaksanaan FGD.....	52
Gambar 8 Buku Saku Bisnis AKSI KOMPAK .....	53
Gambar 9 Sosialisasi Buku Saku Bisnis AKSI KOMPAK .....	53
Gambar 10 Proses Bisnis AKSI KOMPAK .....	54
Gambar 11 Sosialisasi AKSI KOMPAL .....	54
Gambar 12 Lanching dan Penandatanganan bersama .....	55
Gambar 13 Implementasi AKSI KOMPAK.....	55
Gambar 14 Pendampingan Kader .....	56
Gambar 15 Laman Website AKSI KOMPAK .....	57
Gambar 16 Diseminasi Poster dan Media Online.....	58
Gambar 17 Peta Stakeholder sebelum Implementasi .....	61
Gambar 18 Peta Stakeholder sesudah Implementasi .....	61
Gambar 19 Dukungan Pj Bupati Muara Enim .....	64
Gambar 20 Dukungan Deputy Pengembangan Perpustakaan RI .....	64
Gambar 21. SK Tim Inovasi AKSI KOMPAK.....	65

## **EXECUTIVE SUMMARY**

Proyek perubahan “Pemberantasan Judi Online melalui Literasi Ekonomi Berbasis Gerakan Anti Judi Online Terintegrasi dengan Kolaborasi Masyarakat (AKSI KOMPAK)” Dalam rangka Mendukung Pemberantasan Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim” bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya literasi finansial akibat maraknya judi online di Kabupaten Muara Enim. Proyek ini memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat inklusi sosial dan edukasi literasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang literasi keuangan, serta mencegah penyebaran praktik-praktik judi online, pinjaman online dan investasi bodong.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengurangi kemiskinan. Tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,36% pada Maret 2023, lebih tinggi dari target 6,5-7,5%. Berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang rendah, sumber daya alam yang terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesempatan kerja berkontribusi pada kemiskinan. Judi online memperburuk masalah ini dengan menguras sumber daya keuangan dan merusak struktur sosial dan moral, yang sering kali menargetkan individu yang kurang melek finansial. Ini tentunya diakibatkan rendahnya literasi masyarakat. Indeks literasi Kabupaten Muara Enim saat ini ada di angka 62,21 dan TGM di angka 61,68 masih di bawah rata rata indeks Nasional. Selain itu tingkat Literasi Keuangan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 pun masih tergolong rendah dan di bawah nilai rata-rata Nasional (53,00) dengan nilai sebesar 52,73.

Perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi dan pendidikan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan stabilitas ekonomi. Transformasi perpustakaan menjadi pusat inklusi sosial dan literasi keuangan dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan judi online. Proyek AKSI KOMPAK dirancang untuk mendukung peran ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuan Proyek Perubahan ini dalam jangka pendek adalah Mendesain dan menguji coba inisiatif AKSI KOMPAK, Melakukan sosialisasi, implementasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi, serta keberlanjutannya di jangkamenengah dan jangka panjang.

## DESKRIPSI

Negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan. Sustainable Development Goals (SDGs) ditetapkan bertujuan untuk menetapkan penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai prioritas utama. Data BPS Maret 2023 mencatat angka kemiskinan nasional masih 9,36 persen. Padahal, target angka kemiskinan dalam RPJMN 2020–2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5–7,5 persen. Salah satu strategi yang diadopsi adalah Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, yang salah satunya mencakup tema pengentasan kemiskinan. RB Tematik bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu nasional secara cepat dan tepat melalui sinergi dan kolaborasi antar lembaga sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Salah satu ancaman serius yang sedang dihadapi saat ini adalah maraknya judi online. Judi online tidak hanya menguras sumber daya finansial masyarakat sebagai penyumbang angka kemiskinan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral. Fenomena ini terjadi pada masyarakat yang kurang wawasan dan pemahaman akan literasi keuangan sebagai korbannya, dan makin memperburuk kemiskinan dan mengganggu stabilitas ekonomi lokal.

Menkopolkam Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto dalam siaran pers nomor 76/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2024 mengatakan bahwa kunci dalam memberantas judi online ini adalah sinergi dan kolaborasi para kementerian dan lembaga terkait, sesuai arahan Presiden untuk membuat satuan tugas (satgas) yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi judi online tersebut. Satgas tersebut bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, melaksanakan patroli siber, dan publikasi pendidikan judi online termasuk penegakan hukum dan pemblokiran rekening.

Rendahnya literasi masyarakat adalah faktor penyumbang ketidakberdayaan masyarakat terhadap “bujuk rayu” judi online dalam berbagai bentuk. Untuk itu diperlukan strategi AKSI KOMPAK sebagai upaya peningkatan literasi keuangan dan digital masyarakat yang dilakukan secara kolaboratif harmonis yang menyentuh berbagai kelompok sasar. Gagasan ini juga selain amanat Undang Undang Dasar 1945, juga selaras dengan Misi Abadi bernegara ke 3 yakni MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA yang tertuang dalam Kerangka Fikir RPJPN 2025-2045 dengan strategi 8/7/45 (17 Agustus 1945) berlandaskan Pancasila.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam mengatasi kemiskinan. Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk menetapkan penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai prioritas utama, bersama dengan komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk (BAPPENAS, 2023). Berdasarkan BPS, data Maret 2023 mencatat angka kemiskinan nasional masih 9,36 persen. Padahal, target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5–7,5 persen. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya pertumbuhan penduduk, rendahnya pertumbuhan ekonomi lokal dan global, terbatasnya sumber daya alam, rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi, dan kurangnya lapangan pekerjaan merupakan faktor penyebab kemiskinan.

Untuk mempercepat pencapaian target angka kemiskinan mendekati 7,5 persen dan juga kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024, perlu adanya percepatan pengentasan dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas implementasi berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan. Salah satu strategi yang diadopsi adalah Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, yang salah satunya mencakup tema pengentasan kemiskinan. RB Tematik bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu nasional secara cepat dan tepat melalui sinergi dan kolaborasi antar lembaga.

Salah satu ancaman serius yang sedang dihadapi saat ini adalah maraknya judi online. Judi online tidak hanya menguras sumber daya finansial masyarakat, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral. Fenomena ini sering kali menjadikan masyarakat yang kurang wawasan dan pemahaman akan literasi keuangan sebagai korbannya, memperburuk kemiskinan dan mengganggu stabilitas ekonomi lokal.

Selain judi, masyarakat juga saat ini mengakses investasi bodong atau dikenal dengan trading dengan janji dapat kaya dengan cepat melalui binary option, padahal hal ini adalah modus baru dalam dunia perjudian. Untuk itu, pemerintah perlu memberantas hal tersebut dengan berbagai cara agar tingkat kemiskinan semakin menurun.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purnawirawan) Hadi Tjahjanto dalam siaran pers nomor 76/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2024 mengatakan bahwa kunci dalam memberantas judi online ini adalah sinergi dan kolaborasi para kementerian dan lembaga terkait, sesuai dengan arahan Presiden untuk membuat satuan tugas (satgas) yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi judi online tersebut. Satgas tersebut bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, melaksanakan patroli siber, dan publikasi pendidikan judi online termasuk penegakan hukum dan pemblokiran rekening.

Di dalam dunia perpustakaan dan informasi, literasi berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menghadirkan SDM unggul dan berkualitas. Literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional yaitu kemampuan membaca dan menulis, namun juga dapat diterjemahkan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Oleh karena itu, perpustakaan perlu melakukan transformasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Sehingga dengan transformasi yang dilakukan, perpustakaan menjadi wadah ataupun sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pengetahuan dengan berbagai kegiatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pada saat ini, model transformasi yang banyak dilakukan dan dikembangkan di berbagai perpustakaan ialah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu dengan memanfaatkan program penguatan literasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan berujung pada pengentasan kemiskinan masyarakat.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Kabupaten Muara Enim. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengembangan, pendayagunaan, pembinaan semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelestarian hasil budaya, menyelenggarakan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, serta melaksanakan urusan kearsipan di lingkungan Kabupaten Muara Enim.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Kabupaten di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan kearsipan;
- b. Penyusunan rencana dan program Kabupaten di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan kerja sama di bidang perpustakaan dan kearsipan, dengan lembaga lain;**
- d. pelaksanaan pembinaan perpustakaan yang pembinaannya menjadi kewenangan Kabupaten (Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Perpustakaan Khusus);
- e. pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Kearsipan yang pembinaannya menjadi kewenangan Kabupaten;
- f. pelaksanaan seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan bahan perpustakaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan pelayanan perpustakaan dan Jasa kearsipan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan pengguna jasa

- kearsipan;
- h. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi daerah, katalog induk daerah, accessions list, indeks, bibliografi subjek, abstrak dan penyusunan literatur sekunder lainnya;
  - j. pelaksanaan jasa layanan koleksi, dokumentasi, bahan rujukan, naskah, multimedia dan jaringan perpustakaan;
  - k. pelayanan publik di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - l. pelaksanaan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap;
  - m. pelaksanaan pengembangan minat baca dan pembinaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
  - n. pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan koleksi khas daerah,
  - o. pelaksanaan pelestarian;
  - p. *pengembangan sumber daya perpustakaan;*
  - q. *pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi; dan*
  - r. pengelolaan perencanaan, kerjasama hukum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta umum.

Pada Proyek perubahan ini fungsi ***pelaksanaan kerja sama di bidang perpustakaan dan kearsipan, dengan lembaga lain (c)*** adalah menjadi fungsi utama yang dalam pelaksanaannya juga memiliki daya ungkit dan nilai tambah untuk fungsi p (*pengembangan sumber daya perpustakaan*) dan fungsi q (*pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi*)

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim untuk periode 2024-2026 disusun sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim 2005-2025. Visi utamanya adalah mewujudkan Kabupaten Muara Enim yang "Sehat, Mandiri, dan Sejahtera." Dokumen RPD ini menjadi pedoman untuk melanjutkan program pembangunan setelah berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada tahun 2023.

Beberapa fokus utama dalam RPD 2024-2026 adalah memperkuat layanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Rencana ini juga mencakup evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya, khususnya capaian dari RPJMD 2018-2023, serta sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Proses penyusunan RPD dilakukan melalui konsultasi publik dan musyawarah, melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, guna memastikan perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Muara Enim tahun 2024-2026

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif

*Sumber: Rencana Strategis Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026*

Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Perpustakaan Nasional 2019– 2024

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	SEBAGAI FAKTOR	
		PENGHAMBAT (-)	PENDORONG (+)
Meningkatkan minat dan budaya gemar membaca dan Literasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya Pemanfaatan Perpustakaan sebagai tempat budaya gemar membaca dan Literasi masyarakat</li> <li>- Koleksi bahan perpustakaan belum lengkap sesuai NSP</li> </ul>	Tingkat pemenuhan koleksi belum prioritas	Komitmen stakeholder untuk koleksi perpustakaan Lengkap

Sumber: Rencana Strategis Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 – 2024

Tabel 3. Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 – 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.	Meningkatnya Budaya Gemar membaca di Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan minat baca dan Pengembangan perpustakaan.</li> <li>2. Meningkatkan penyediaan bahan pustaka tercetak maupun elektronik yang uptodate.</li> </ol>

Sumber: Rencana Strategis Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

Kabupaten Muara Enim dengan kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya tingkat literasi, maraknya judi online, dan belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal menjadi hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan data statistik, tingkat literasi di Kabupaten Muara Enim masih memerlukan perhatian khusus. Pada tahun 2023, tingkat literasi di Kabupaten Muara Enim masih berada di bawah indeks nasional. Indeks Pembangunan Literasi

Masyarakat (IPLM) di Muara Enim tercatat sebesar 62,21 jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 69,42, sedangkan untuk Tingkat Gemar Membaca (TGM) di Muara Enim adalah 61,68 dari rata-rata nasional mencapai 66,77.

Hal ini berdampak langsung salah satunya pada kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengelola keuangan pribadi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. Hal ini di perkuat juga dengan hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang dirilis oleh OJK dimana menyatakan indeks literasi keuangan Provinsi Sumatera Selatan masih rendah di angka 52,73 dari rata-rata nasional yang juga masih rendah yaitu 53,00. Berikut kondisi ukuran indeks literasi per tahun disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4. Indeks IPLM, dan TGM Kabupaten Muara Enim dan Nasional

PROVINSI/KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM
<b>PROVINSI SUMATERA SELATAN</b>	<b>0.4196</b>	<b>0.2924</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.0928</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>68.64</b>
Kab. Banyuasin	0,3884	0,3152	0,3929	0,3622	1,0000	1,0000	1,0000	63,70
Kab. Empat Lawang	0,4638	0,0503	0,8038	0,0282	0,7785	1,0000	1,0000	58,92
Kab. Lahat	0,3355	0,0362	0,4703	0,0512	0,9734	1,0000	1,0000	55,24
<b>Kab. Muara Enim</b>	<b>0,4092</b>	<b>0,2287</b>	<b>0,6851</b>	<b>0,0317</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>62,21</b>

REKAP NILAI HASIL KAJIAN TGM (TINGKAT KEDEMARAN MEMBACA)  
BERDASARKAN 5 DIMENSI PENGUKURAN NILAI TGM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR					NILAI TGM	KATEGORI
		FM	DM	JB	FAI	DAI		
1	Pagar Alam	70,01	59,38	71,19	77,56	65,18	67,01	tinggi
2	Ogan Ilir (OI)	67,01	60,38	65,48	66,13	63,68	64,35	tinggi
3	PALU	67,13	62,19	60,36	63,65	65,18	63,35	tinggi
4	Muara Enim	60,55	61,13	62,31	64,58	65,13	61,68	tinggi
5	Empat Lawang	60,59	59,14	62,31	64,58	65,13	61,10	tinggi
6	Palembang	59,18	58,13	60,36	63,45	64,18	59,68	sedang
7	Prabumulih	57,38	58,13	60,36	63,45	64,18	59,14	sedang
8	OKU Timur	63,50	41,25	66,38	75,88	52,13	57,74	sedang
9	OKI	61,56	42,44	64,88	73,38	52,44	56,95	sedang
10	Murata	56,38	47,81	62,88	69,69	58,56	56,53	sedang
11	Lahat	60,94	42,06	63,88	71,88	52,88	56,30	sedang
12	Banyuasin	58,81	41,44	60,88	68,63	48,94	54,22	sedang
13	MUBA	57,31	39,25	62,50	68,75	51,50	53,73	sedang
14	OKU Selatan	57,06	41,63	60,44	65,31	49,88	53,50	sedang
15	OKU	55,25	40,63	59,00	66,44	51,19	52,34	sedang
16	Musi Rawas	50,19	41,69	54,25	61,44	48,44	49,33	sedang
17	Lubuklinggau	51,56	37,94	54,75	60,94	47,25	48,68	sedang
	PROV. SUMSEL	59,65	49,10	61,89	67,40	56,81	57,39	sedang

**Keterangan:**

FM : Frekuensi Membaca per minggu  
DM : Durasi Membaca per hari  
JB : Jumlah Buku selesai dibaca dalam waktu 3 bulan  
FAI : Frekuensi Akses Internet per minggu  
DAI : Durasi Akses Internet per hari

Beberapa indikator dalam peningkatan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah ketercukupan koleksi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan untuk berupaya mengentaskan kemiskinan, maka perlu adanya penyediaan koleksi atau bahan bacaan dengan tematik pengentasan kemiskinan dan literasi keuangan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait literasi keuangan.

Menurut OJK (2017), literasi keuangan bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan saja, melainkan berkaitan juga dengan kebiasaan masyarakat terkait keuangan. Tingkat literasi keuangan yang dimiliki masyarakat juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan masyarakat yang terliterasi dengan baik pada keuangan akan lebih mudah memahami sektor keuangan yang kemudian akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang mendukung kesejahteraan mereka. Selain itu, masyarakat yang memiliki pemahaman pada keuangan juga akan mampu melindungi dirinya dari potensi kerugian di sektor keuangan termasuk terhindar dari judi online dan investasi bodong.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan maraknya korban judi online, pinjaman online, dan investasi bodong salah satunya disebabkan karena kurangnya pemahaman literasi keuangan masyarakat. Untuk itu diperlukan inovasi Perubahan dari dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim untuk ambil bagian dalam tugas fungsinya melaksanakan urusan perpustakaan yang berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai urusan wajib non pelayanan dasar. Tentunya dengan tetap memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi masyarakat, penggiat, dan antar kelembagaan.

## 1.2 Tujuan dan Manfaat Organisasi Adaptif

### 1.2.1 Tujuan

Dalam proyek perubahan ini tentunya adalah untuk membangun organisasi yang adaptif yang setidaknya mengandung 3 unsur (*agile*, merespons cepat, dan berorientasi pada hasil). Ada 3 (tiga) tahapan untuk mencapai tujuan di proyek perubahan ini, yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Berikut ini adalah milestone tujuan proyek perubahan yang akan dilaksanakan.

a. Tujuan Jangka Pendek (selama 2 bulan)

Tujuan jangka pendek proyek perubahan ini adalah:

1. Penyediaan bahan bacaan digital literasi keuangan berupa titik baca dan penambahan koleksi Digital “Medali” Muara Enim Digital Library
2. Edukasi, Kolaborasi, Sosialisasi tematik Literasi Keuangan
3. Kampanye literasi digital (Flyer, Video himbauan, pamflet, sms, dll.)
4. Pembentukan Satgas Literasi Judi online Dinas Perpustakaan
5. Tujuan Jangka Menengah (selama 1 tahun)

b. Tujuan jangka menengah proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya AKSI KOMPAK sebagai salah satu unsur utama pada SKP JPTP (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) Kab. Muara Enim.
2. Tersusunnya perjanjian kinerja bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional.
3. Tersusunnya RAB sebagai bahan RKA Perubahan 2024 atau APBD murni 2025.
4. Terbentuknya pengembangan kerjasama P3 dan CSR
5. Tersusunnya rencana aksi terpadu mengenai literasi keuangan anti judi online.

c. Tujuan Jangka Panjang (lebih dari 1 tahun)

Tujuan jangka panjang proyek perubahan ini adalah pencapaian yang ingin dicapai dalam jangka waktu beberapa tahun hingga beberapa dekade. Tujuan ini mencerminkan visi atau ambisi jangka panjang seseorang atau organisasi, yang dapat menjadi panduan untuk pengambilan keputusan strategis dan perencanaan jangka panjang. Untuk itu tujuan jangka panjang proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. AKSI KOMPAK sebagai bagian dari infrastruktur Muara Enim “Merakyat”.
2. AKSI KOMPAK sebagai infrastruktur yang terkait dengan infrastruktur satu data yang ada di Kominfo.
3. AKSI KOMPAK sebagai infrastruktur yang terkait dengan infrastruktur nasional.

### **1.2.2 Manfaat**

Manfaat dari Strategi peningkatan literasi masyarakat dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui AKSI KOMPAK (Anti Judi Online Terintegrasi dengan Kolaborasi Masyarakat) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Pusat, Satgas Nasional Judi Online, Institusi POLRI:

- 1) AKSI KOMPAK sebagai pendukung transformasi sosial dan transformasi ekonomi pada RPJPN 2025 – 2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045.
- 2) AKSI KOMPAK mendukung misi ke-2 RPJPN 2005- 2025 sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yakni mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan sasaran terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.
- 3) AKSI KOMPAK mendukung Sasaran Strategis ke-2 RENSTRA

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 yakni peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter.

- 4) AKSI KOMPAK mendukung pelaksanaan RB berdampak sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

b. Bagi Perpustakaan Nasional

- 1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
- 2) Meningkatkan Tingkat Gemar Membaca Masyarakat
- 3) Mengembangkan peran serta masyarakat untuk mencapai kinerja pelayanan kepada masyarakat dibidang literasi keuangan

c. Bagi Pemerintah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim)

- 1) Meningkatkan IPLM dan TGM Kabupaten Muara Enim
- 2) Meningkatkan Kompetensi SDM dalam melakukan edukasi literasi keuangan
- 3) Mengembangkan peran serta masyarakat untuk mencapai kinerja pelayanan kepada masyarakat dibidang literasi keuangan
- 4) Penambahan koleksi bahan pustaka digital
- 5) AKSI KOMPAK merupakan tools dari strategi social engineer untuk memberantas judi online dimasa yang akan datang
- 6) Memperkuat kompetensi manajerial project leader pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khususnya dalam aspek integritas, komunikasi, kerjasama, mengambil keputusan, mengembangkan potensi diri dan orang lain, memberikan pelayanan, dan bekerja

berorientasi hasil.

d. Bagi Kabupaten/Kota

Sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

e. Masyarakat

1. Setiap kegiatan AKSI KOMPAK melibatkan masyarakat tanpa biaya.
2. AKSI KOMPAK mendorong peningkatan indeks literasi keuangan masyarakat melalui program spesifik di bidang literasi keuangan yang lebih masif. Dengan harapan terjadi peningkatan indeks literasi keuangan masyarakat yang berdampak pada penurunan pengguna judi online.
3. Masyarakat yang terliterasi dengan baik pada keuangan akan lebih mudah memahami sektor keuangan yang kemudian akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang mendukung kesejahteraan mereka.
4. Masyarakat yang memiliki pemahaman pada keuangan juga akan mampu melindungi dirinya dari potensi kerugian di sektor keuangan termasuk terhindar dari judi online dan investasi bodong.

### **1.3 Ouput dan Outcome**

#### **1.3.1 Ouput**

*Output* dari *project* perubahan ini adalah Terlaksananya Gerakan Anti Judi Online Terintegrasi dengan Kolaborasi Masyarakat (AKSI KOMPAK), yang dimulai AKSI KOMPAK ini. Output adalah hasil atau produk akhir dari suatu proses atau kegiatan. Output sering kali diukur dan dievaluasi untuk menentukan efektivitas, efisiensi, atau keberhasilan suatu proses atau sistem. Hal ini membantu dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja baik dalam konteks ekonomi, industri, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Output yang dihasilkan proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

A. Output Jangka Pendek (2 Bulan), meliputi:

1. Penyediaan bahan bacaan digital literasi keuangan berupa titik baca dan penambahan koleksi Digital “Medali” Muara Enim Digital Library
2. Edukasi, Kolaborasi, Sosialisasi tematik Literasi Keuangan
3. Kampanye literasi digital (Flyer, Video himbauan, pamflet, sms, dll.)
4. Pembentukan Satgas Literasi Judi online Dinas Perpustakaan

B. Output Jangka Menengah (1 Tahun), meliputi:

1. Tersusunnya AKSI KOMPAK sebagai salah satu unsur utama pada SKP JPTP (Kabupaten Muara Enim)
2. Tersusunnya perjanjian kinerja bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional.
3. Tersusunnya RAB sebagai bahan RKA Perubahan 2024 atau APBD murni 2025.
4. Terbentuknya pengembangan kerjasama P3 dan CSR.
5. Tersusunnya rencana aksi terpadu mengenai literasi keuangan anti judi online.

C. Output Jangka Panjang (2 Tahun), meliputi:

1. AKSI KOMPAK sebagai bagian dari infrastruktur Muara Enim “Merakyat”.
2. AKSI KOMPAK sebagai infrastruktur yang terkait dengan infrastruktur satu data yang ada di Kominformuara.
3. AKSI KOMPAK sebagai infrastruktur yang terkait dengan infrastruktur nasional

Hasil yang diharapkan dari proyek perubahan ini adalah Tercapainya indeks pembangunan literasi masyarakat dan gemar membaca Kabupaten Muara Enim setara atau bahkan melebihi rata-rata nasional.

### **1.3.2 Outcome**

*Outcome* AKSI KOMPAK akan dikaitkan dengan upaya mencapai tujuan dalam jangka menengah dan jangka panjang termasuk output yang akan diwujudkan, Adapun outcome dalam proper ini akan dikaitkan dengan:

A. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010 – 2025 dan Peraturan MenpanRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Atas dasar ketentuan tersebut proyek perubahan ini berkaitan dengan area perubahan sebagai berikut:

- 1.1 Manajemen perubahan dengan mengubah sistem, pola pikir masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan dan bahaya judi online.
- 2.2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan judi online.
- 3.3 Penataan dan penguatan organisasi melalui pengembangan kolaborasi pengembangan kelembagaan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Instansi vertikal, Kepolisian, OJK dan satgas judi online Kabupaten Muara Enim.
- 4.4 Penataan tatalaksana terkait implementasi AKSI KOMPAK dalam bentuk proses bisnis layanan.
- 5.5 Penataan Sumber daya dalam arti peningkatan kompetensi Sumber daya aparatur dan non aparatur dalam upaya mengefektifkan AKSI KOMPAK Peningkatan Kinerja.

- 6.6 Penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai IKU Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim dalam rangka membentuk *pilot project* AKSI KOMPAK. Upaya ini juga akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penilaian SKP dan Perjanjian Kinerja.
- 7.7 Penguatan Pengawasan sebagai sebuah strategi penerapan PP 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 8.8 Secara nasional berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan bahan bacaan digital yang diharapkan juga mampu mendukung keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia. Sejalan dengan Govtech, INA Digital yang diluncurkan Presiden RI pada 27 Mei 2024, sesuai amanat yang tertuang pada Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Yang berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah, mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien demi mengembangkan solusi tepat guna yang menjawab kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan integrasi layanan publik berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagi Pemerintah Kabupaten sendiri tentunya ini membantu Terwujudnya misi ke-7 Kabupaten Muara Enim yakni Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Selain 8 area tersebut, AKSI KOMPAK berkaitan dengan Reformasi Birokrasi berdampak tematik, yaitu kemiskinan.
- A. Berkaitan dengan RPJPN Nasional 2025-2045 yaitu mendukung agenda 1 mewujudkan transformasi sosial dalam meningkatkan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan kohesif, serta agenda 2 mewujudkan transformasi ekonomi dalam transformasi

digital.

- B. Seiring dengan Sasaran Jangka Menengah Renstra Perpustakaan Nasional 2019 – 2024 dalam Meningkatkan Minat dan Budaya Gemar Membaca dan Literasi Masyarakat”, maka project perubahan ini merupakan tolls pendukung program nasional dalam komponen IPLM dalam sosialisasi minat baca dan peran serta masyarakat dalam sosialisasi. Selain itu pendukung komponen penyediaan bahan bacaan.
- C. Mengurangi tingkat kemiskinan akibat judi online melaluipeningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat akan literasi keuangan.

## **BAB II**

### **RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN**

#### **2.1 Deskripsi Proyek Perubahan**

##### **2.1.1 Identifikasi Masalah**

Dalam rangka mengidentifikasi strategi pemecahan masalah, AKSI KOMPAK mendukung RPJPN 2025-2045 yang termuat dalam Visi Indonesia Emas 2045 agenda ke 5 Ketahanan sosial budaya dan ekologi serta arah Pembangunan ke 13 yaitu Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju melalui Peningkatan budaya Literasi, Kreativitas, dan Inovasi Juga Mendukung Agenda Transformasi Sosial dan Transformasi Ekonomi.

Selain itu, mendukung Visi Kabupaten Muara Enim “MUARA ENIM UNTUK RAKYAT YANG AGAMIS, BERDAYA SAING, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA” melalui misi transformasi sosial dan transformasi ekonomi dengan fokus sasaran dan indikator pada kemiskinan dan ketimpangan pada tingkat yang rendah serta kualitas sumber daya manusia yang meningkat.

Indikator yang diukur untuk menghasilkan tingkat literasi keuangan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan, serta sikap dan perilaku keuangan untuk menilai upaya peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan individu.

Tingkat Keberadaban Digital hasil rilis dari survey yang dilakukan *Microsoft* menyatakan bahwa netizen Indonesia juga sangat rendah, tercatat pada tahun 2021 Indonesia berada di peringkat 29 dari 32 negara di Asia. Sementara untuk Asia Tenggara, tingkat Keberadaban Digital, indeks Indonesia berada di peringkat paling buruk. Keberadaban yang dimaksud dalam survey tersebut terkait dengan perilaku berselancar di dunia maya dan aplikasi media sosial, termasuk risiko terjadinya penyebaran berita bohong atau hoaks,

ujaran kebencian atau hate speech, diskriminasi, misogini, cyberbullying, trolling atau tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, micro-aggression atau tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal (kelompok etnis atau agama tertentu, perempuan, kelompok difabel, kelompok LGBTQ dan lainnya) hingga ke penipuan, doxing, judi online atau mengumpulkan data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya guna mengganggu atau merusak reputasi seseorang, hingga rekrutmen kegiatan radikal dan teror, serta pornografi. Selain itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Muara Enim tercatat sebesar 62,21 jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 69,42, sedangkan untuk Tingkat Gemar Membaca (TGM) di Muara Enim adalah 61,68 dari rata-rata nasional mencapai 66,77.

Hal ini dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Muara Enim akan pentingnya literasi masih sangat kurang. Untuk itu perlu adanya strategi peningkatan literasi masyarakat dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui AKSI KOMPAK yang turut mendukung capaian sasaran strategis ke-2 RENSTRA Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter juga dapat menjadi komponen pengungkit dalam peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang menjadi sasaran strategis dari Perpustakaan Nasional. Dalam hal ini AKSI KOMPAK mendukung beberapa unsur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yakni unsur ketercukupan koleksi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi atau promosi.

Pada RPJMD Kabupaten Muara Enim 2020-2024 AKSI KOMPAK mendukung misi ke-7 yakni mewujudkan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Selanjutnya AKSI KOMPAK mendukung kampanye yang dilakukan oleh POLRI sesuai saran BPK dalam pencegahan judi online secara komprehensif dengan melibatkan seluruh stake holder, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kejahatan siber akan dapat mencegah dan mengurangi potensi terjadinya tindak pidana judi online dan turut berperan aktif dalam meningkatkan “literasi untuk kesejahteraan” sesuai tagline Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sebab AKSI KOMPAK secara spesifik diproyeksikan untuk meningkatkan literasi keuangan yang rendah sebagai penyebab maraknya judi online dan dampak dari perputaran uang pada aktivitas judi akan memperkuat ekonomi bawah tanah (*underground economy*) dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas dalam perekonomian negara. Ekonomi bawah tanah (*underground economy*) sendiri mencakup aktivitas ekonomi yang tak terdaftar dan tak dikenai pajak oleh pemerintah. Ini jelas menimbulkan risiko besar bagi stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan pernyataan dari PPATK menyebutkan bahwa 3,2 juta pemain judi online hampir 80 persen yang teridentifikasi itu adalah pelajar, mahasiswa, dan juga Ibu rumah tangga. Berdasarkan Identifikasi masalah di atas dikaitkan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim saat ini adalah:

1. Indeks Literasi dan TGM masih di bawah Indeks Nasional Pada tahun 2023, tingkat literasi di Kabupaten Muara Enim masih berada di bawah indeks nasional. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Muara Enim tercatat sebesar 62,21 jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 69,42, sedangkan untuk Tingkat Gemar Membaca (TGM) di Muara Enim adalah 61,68 dari rata-rata nasional mencapai 66,77.
2. Jumlah Perpustakaan yang sudah terakreditasi di Kab Muara Enim masih sangat rendah, Jumlah Perpustakaan terakreditasi 33 dari total 586 perpustakaan di Kabupaten Muara Enim.

3. Jumlah tenaga pustakawan masih kurang, Jumlah pustakawan 8 Orang di Kabupaten Muara Enim.

Dari berbagai permasalahan atau isu strategis yang telah diidentifikasi dalam rancangan proyek perubahan ini maka menggunakan metode ASTRID yaitu: **Aktual:** Isu yang sedang atau baru saja terjadi. **Spesifik:** Isunya tidak terlalu umum. **Transformasi:** Ada perubahan, tidak statis dan berpengaruh pada bidang lainnya. **Relevan:** Sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dan tugas dan tanggungjawab. Pejabat **Inovatif:** bersifat kebaruan bagi organisasi. **Dapatdilakukan:** Dapat diselesaikan selama masa pelatihan.

Tabel 5. Analisis Isu Strategis dengan Metode ASTRID

NO	ISU-ISU	KRITERIA						JUMLAH	RANK
		A	S	T	R	I	D		
		20%	10%	10%	15%	20%	25%	100%	
1	Indeks Literasi dan TGM masih di bawah Indeks Nasional	15	8	8	15	15	15	76	I
2	Jumlah Perpustakaan yang sudah terakreditasi di Kabupaten Muara Enim masih sangat rendah	13	7	6	15	15	10	66	II
3	Jumlah tenaga pustakawan masih kurang	10	7	5	15	10	10	57	III

### 2.1.2 Kondisi Ideal yang diharapkan

Dalam konteks sebuah proyek perubahan, kondisi ideal yang diharapkan merujuk pada situasi di mana perubahan yang direncanakan berhasil diimplementasikan dengan lancar, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi organisasi atau individu yang terlibat. Proyek perubahan biasanya terkait dengan transformasi proses, teknologi, budaya, atau struktur organisasi

untuk mencapai perbaikan atau inovasi.

Tabel 6. Kondisi idealnya yang diharapkan

NO	KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1.	Belum ada kader Literasi keuangan terkait judi online	Terlaksananya AKSI KOMPAK sebagai tools strategi terintegrasi pemberantasan judi online sebagai bagian dari literasi keuangan
2	Diseminasi berbasis literasi dengan sinergi antar lintas pelaku belum pernah dilakukan	Terlaksananya diseminasi di 3 kabupaten sebagai pilot project dengan semangat AKSI KOMPAK
3.	Literasi Keuangan saat ini sebesar 52,73 dibawah rata-rata nasional	Target Literasi Keuangan naik menjadi 53,00
4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Muara Enim tercatat sebesar 62,21 jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 69,42, sedangkan untuk Tingkat Gemar Membaca (TGM) di Muara Enim adalah 61,68 dari rata-rata nasional mencapai 66,77.	IPLM Muara Enim tahun 2024 sebesar 62,21 dan TGM Kabupaten Muara Enim tahun 2024 sebesar 61,68.

### 2.1.1 Terobosan/Inovasi

Sehubungan dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan adanya terobosan/inovasi yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim. Terobosan/inovasi yang diambil dilakukan secara bertahap yaitu pada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pada Akhirnya yang ingin dicapai adalah dampak (impact) dari terlaksananya terobosan/inovasi tersebut. Terobosan/inovasi yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 7. Analisis SWOT Indeks Literasi dan TGM masih di bawah Indeks Nasional

<div>FAKTOR INTERNAL</div> <div>FAKTOR EKSTERNAL</div>	<b>Strengths (Kekuatan)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada.</li> <li>- Dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait.</li> <li>- Potensi besar dalam peningkatan literasi dan keterampilan Masyarakat, seperti akses informasi yang lebih luas dan cepat, pemberdayaan asyarakat, dan inklusi social</li> </ul>	<b>Weaknesses (Kelemahan)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya tingkat literasi dan minat baca masyarakat.</li> <li>- Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan perpustakaan digital.</li> <li>- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan digital.</li> </ul>
	<b>Opportunities (Peluang)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemajuan teknologi informasi yang pesat.</li> <li>- Potensi kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan.</li> <li>- Program-program literasi yang dapat diintegrasikan dengan perpustakaan digital.</li> </ul>	<b>Strategi S-O Strengths – Opportunities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Gerakan Anti Judi Online Kolaborasi Masyarakat (AKSI KOMPAK)</b>, menggandeng kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk mendukung program literasi.</li> <li>- Transformasi perpustakaan dan kearsipan digital, memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi yang ada untuk mengembangkan perpustakaan digital.</li> </ul>
		<b>Strategi W-O Weaknesses – Opportunities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan perpustakaan digital.</li> <li>- Mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan digital.</li> </ul>
	<b>Threats (Ancaman)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketimpangan akses teknologi di berbagai wilayah.</li> <li>- Tantangan dalam mengubah budaya membaca masyarakat.</li> <li>- Persaingan dengan sumber informasi digital lainnya.</li> </ul>	<b>Strategi S-T Strengths – Threats</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan dukungan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk mengatasi ketimpangan akses teknologi.</li> <li>- Mengembangkan program-program literasi yang menarik untuk mengubah budaya membaca masyarakat.</li> </ul>
		<b>Strategi W-T Weaknesses – Threats</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dengan pelatihan intensif.</li> <li>- Mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap perpustakaan digital.</li> </ul>

Gambar 1. Kerangka Fikir Penulisan

Dari gambar di atas dalam menyelesaikan isu strategis "rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)" inovasi yang ditawarkan adalah **Strategi peningkatan literasi masyarakat dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui AKSI KOMPAK (Anti judi Online Terintegrasi dengan Kolaborasi Masyarakat) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim** yang memenuhi kriteria inovasi sebagai berikut :

Tabel 8 Kriteria Inovasi

No	Kriteria Inovasi	Uraian
1	Memberikan nilai tambah bagi organisasi dan stakeholder	Penilaian kinerja kepemimpinan menjadi baik dan optimal
2	Memiliki unsur kebaharuan	Pelaksanaan AKSI KOMPAK merupakan inovasi baru dan sangat diperlukan di Kabupaten Muara Enim
3	Bisa di replikasi	Inovasi Pelaksanaan AKSI KOMPAK bisa menjadi solusi untuk meningkatkan literasi keuangan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat di replikasi oleh Perangkat Daerah Lain
4	Dapat diterapkan secara Berkelanjutan	Inovasi Pelaksanaan AKSI KOMPAK dapat diterapkan secara berkelanjutan
5	Sesuai dengan nilai-nilai organisasi	Mengembangkan sistem nilai dan budaya organisasi dengan kecenderungan tuntutan organisasi kedepan.

## 2.2 Tahapan Perubahan/Milestone Rencana Strategis

Tahapan perubahan atau milestone dalam rencana strategis adalah langkah-langkah penting yang perlu dicapai untuk memastikan implementasi proyek perubahan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan perubahan yang direncanakan dalam implementasi AKSI KOMPAK dibagi ke dalam tiga fase berdasarkan waktu yang dibutuhkan, yaitu: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Masing-masing tahapan perubahan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Tahapan dan Milestone Proyek Perubahan

No.	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA	OUTPUT	WAKTU
	<b>JANGKA PENDEK</b>			
	<b>PERSIAPAN</b>			
1.	Penyediaan bahan bacaan digital literasi keuangan berupa titik baca dan penambahan koleksi Digital “Medali” Muara Enim Digital Library	1. Project leader 2. Stakeholder	1. Dokumentasi 2. Notula	21 Oktober 2024
2.	Edukasi, Kolaborasi, Sosialisasi tematik Literasi Keuangan	1. Project leader	1. SK Tim Kerja	21 Oktober 2024
3.	Kampanye literasi digital (Flyer, Video himbauan, pamflet, sms, dll.)	1. Project Leader 2. Tim Kerja (Tim Efektif)	1. Dokumentasi 2. Notula	21 Oktober 2024
4.	Pembentukan Satgas Literasi Judi online Dinas Perpustakaan	1. Project leader 2. Tim Kerja (Tim Efektif)	1. Sekretariat 2. SK Petugas	21 Oktober 2024

No.	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA	OUTPUT	WAKTU
	<b>Jangka Menengah</b>			
1.	Tersusunnya AKSI KOMPAK sebagai salah satu unsur utama pada SKP JPTP (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) Kab. Muara Enim.	1. Project leader 2. Tim Sekretariat	1. SKP	21 Oktober 2024
2.	Tersusunnya perjanjian kinerja bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan fungsional	1. Project leader 2. Tim Sekretariat	1. Perjanjian Kinerja	21 Oktober 2024
3.	Tersusunnya RAB sebagai bahan RKA Perubahan 2024 atau APBD murni 2025.	1. Project leader 2. Tim Kerja	1. RAB 2. RKA	21 Oktober 2024
4.	Terbentuknya pengembangan kerjasama P3 dan CSR	1. Project leader 2. Tim Kerja	1. Proposal	21 Oktober 2024
5.	Tersusunnya rencana aksi terpadu mengenai literasi keuangan anti judi online	1. Project leader 2. Tim Kerja	1. Rencana Aksi	21 Oktober 2024

No.	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA	OUTPUT	WAKTU
	<b>Jangka Panjang</b>			
1.	AKSI KOMPAK sebagai bagian dari infrastruktur Muara Enim “Merakyat”.	1. Project leader 2. Tim Kerja	Laporan	21 Oktober 2024
2.	AKSI KOMPAK sebagai infrastruktur yang terkait dengan infrastruktur satu data yang ada di Kominfo.	1. Project leader 2. Tim Kerja	Laporan	21 Oktober 2024
3.	Mengimplementasikan AKSI KOMPAK sebagai infrastruktur yang terkait dengan infrastruktur Nasional .	1. Project leader 2. Tim Kerja	Laporan	21 Oktober 2024
4.	AKSI KOMPAK sebagai infrastruktur yang terkait dengan infrastruktur nasional	1. Project leader Tim Kerja	Laporan	21 Oktober 2024

## 2.3 Analisis Stakeholder dan Rencana Strategi Marketing

### 2.3.1 Analisis Stakeholder dan Pemanfaatan Sumberdaya Organisasi

#### A. Identifikasi stakeholder

Identifikasi jenis stakeholder diperlukan dalam rangka memetakan dukungan terhadap keberhasilan proyek perubahan. Dalam pemetaan stakeholder, dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu

Stakeholder utama, Stakeholder Internal, Stakeholder Eksternal Pemerintah dan Stakeholder Eksternal Non Pemerintah. Adapun hasil identifikasi jenis stakeholder yaitu sebagai berikut:

Tabel 10 Identifikasi Stakeholder

UTAMA	INTERNAL	EKSTERNAL (Pemerintah)	EKSTERNAL (Non Pemerintah)
1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten III Administrasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kasubag 5. Pustakawan 6. Tim Kerja	1. DPRD 2. Polda Sumsel 3. Bank Indonesia Sumsel 4. OJK 5. Dinas Kominfotik Kabupaten Muara Enim 6. Inspektorat Kabupaten Muara Enim 7. Bappeda Kabupaten Muara Enim 8. BPKAD Kabupaten Muara Enim 9. Satpol PP Kabupaten Muara Enim 10. Dinas Pendidikan	1. Pegiat Literasi 2. Perguruan Tinggi 3. SMA/SMK 4. PIC TPBIS 5. Pengelola Perpustakaan Desa 6. Majelis Taklim 7. Perangkat Desa 8. Forum CSR 9. Organisasi Profesi 10. LSM
Jumlah : 3	Jumlah : 6	Jumlah : 10	Jumlah : 10
<b>TOTAL : 29</b>			

## B. Pemetaan stakeholder

Hasil identifikasi atau pemetaan stakeholders dilakukan untuk mengetahui penempatan posisi stakeholders, baik internal dan eksternal sehingga dapat mudah menganalisa dan memahami seberapa besar pengaruh stakeholders dalam proyek perubahan ini. Analisis stakeholders dilakukan dengan menggunakan matriks/kuadran Kelompok, stakeholders berdasarkan tingkat pengaruh (Influence) dan kepentingannya (Interest) yaitu sebagai berikut:

Gambar 2. Peta Stakeholder 4 Kuadran Proyek Perubahan

B



1. *PROMOTOR* = Kepentingan Tinggi dan Pengaruh Tinggi  
Promotor adalah stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi terhadap proyek perubahan. Stakeholder yang masuk dalam kuadran ini adalah Bupati Muara Enim, KAPOLRES Ketua (FORKOMPIMDA), DPRD, Bank Indonesia dan OJK.
2. *LATENS* = Kepentingan Rendah dan Pengaruh Tinggi Pada kuadran ini diidentifikasi stakeholder yang kurang memiliki kepentingan rendah terhadap proyek perubahan, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap proyek perubahan maupun stakeholder sendiri. Stakeholder yang masuk dalam kuadran ini adalah BPKAD, BAPPEDA, Organisasi Profesi, Forum CSR, dan Dinas Pendidikan.
3. *APHETETIC* = Kepentingan Rendah dan Pengaruh Rendah  
Pada kuadran ini adalah stakeholder yang kurang memiliki Kepentingan dan pengaruh yang kurang. Stakeholder yang masuk dalam kuadran ini adalah Perangkat Daerah lain yang tidak terkait langsung, Perangkat desa, dan LSM.
4. *DEFENDER* = Kepentingan Tinggi dan Pengaruh Rendah  
Pada kuadran ini stakeholder tergolong memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah. Stakeholder yang masuk dalam kuadran ini adalah Pegiat Literasi, Asisten, Dinas Kominform, Inspektorat, Satpol PP, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Pustakawan, PIC TPBIS, Pengelola Perpustakaan desa.

Dalam membangun jejaring dan kolaborasi, peta stakeholder diperlukan untuk mengidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh proyek perubahan yang dilakukan, serta mengetahui tingkat kepentingan dan pengaruh mereka terhadap proyek perubahan tersebut, serta mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik, resistensi, atau hambatan yang mungkin timbul. Dengan demikian, dapat ditentukan strategi yang tepat untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan masing-masing stakeholder, serta mengantisipasi potensi risiko atau konflik yang mungkin timbul.

Penerapan strategi komunikasi dimaksudkan untuk menyampaikan tujuan, manfaat, dan proses perubahan organisasi kepada para stakeholder yang terlibat atau terdampak oleh perubahan tersebut, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, penerimaan, dan dukungan terhadap perubahan organisasi. Selain itu dengan penerapan strategi komunikasi yang tepat dapat mengurangi ketakutan, kecemasan, dan ketidakpuasan terhadap perubahan organisasi.

Pemetaan stakeholder ini memiliki manfaat untuk mengetahui Tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholder. Tujuan utama pemetaan ini adalah untuk mendorong stakeholder padakuadran *latens*, *aphetetis* dan *defender* agar dapat menjadi promotor dalam proyek perubahan AKSI KOMPAK. Oleh karena itu diperlukan strategi atau pendekatan khusus untuk mencapai tujuan ini. Strategi marketing yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan ini diuraikan pada bagian selanjutnya.

### 2.3.2 Strategi Marketing

#### A. Strategi Komunikasi

Untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan, perlu adanya upaya menggerakkan stakeholder di masing-masing kuadran melalui Teknik sebagai berikut:

Tabel 11. Strategi Komunikasi dengan stakeholders 4 kuadran

No	Kuadran	Upaya yang Dilakukan
1.	<i>Promoters</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meyakinkan bahwa proyek perubahan memang sangat Dibutuhkan</li><li>b. Memanfaatkan dukungan untuk melaksanakan seluruh tahapan proyek perubahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.</li><li>c. Melakukan konsultasi dan meminta arahan kebijakan ada setiap tahapan proyek perubahan</li><li>d. Selalu berkoordinasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.</li><li>e. Meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalan, kendala dan hambatan yang terjadi</li></ul>
2.	<i>Latens</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan komunikasi efektif untuk meyakinkan manfaat dari proyek perubahan ini</li><li>b. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam proses kegiatan</li><li>c. Memberikan informasi secara keberlanjutan tentang proyek perubahan yang akan dilakukan</li></ul>
3.	<i>Defenders</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek perubahan yang akan di lakukan</li><li>b. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam proses kegiatan</li><li>c. Melakukan komunikasi dan interaksi dalam pelaksanaan proyek perubahan</li></ul>
4.	<i>Apathetics</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan pemahaman akan arti penting dan manfaat proyek perubahan</li><li>b. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi tentang pelaksanaan proyek perubahan dan hasilnya</li><li>d. Memberikan motivasi agar ikut berkontribusi terhadap kegiatan proyek perubahan</li></ul>

Tabel 12. Strategi Komunikasi

No.	Pemangku Kepentingan	Ekspektasi	Strategi Komunikasi
1.	Pj. Bupati	Mendapatkan dukungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan audiensi</li> <li>• Meminta saran dan pertimbangan</li> <li>• Membuat telaahan staf</li> <li>• Membuat Laporan</li> </ul>
2.	Sekretaris Daerah /Mentor	Mendapatkan dukungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminta advice</li> <li>• Meminta saran dan pertimbangan</li> <li>• Meminta arahan, masukan dan bimbingan teknis</li> </ul>
3.	Dinas terkait	Memberikan bantuan dan dukungan terkait proper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminta arahan, masukan dan bimbingan teknis</li> <li>• Meminta saran dan pertimbangan</li> </ul>
4.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Muara Enim	Memberikan bantuan dan dukungan terkait proper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Supervisi</li> <li>• Melakukan Pembinaan</li> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Memobilisasi untuk menyatukan kekuatan</li> <li>• Fasilitasi</li> </ul>
5.	Tim Kerja	Memberikan bantuan dan dukungan aspek administrasi dan keberlangsungan terkait proper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan arahan, masukan dan bimbingan teknis kepada Tim Kerja</li> <li>• Memobilisasi tim kerja</li> <li>• Memfasilitasi konflik</li> <li>• Memotifasi tim kerja</li> </ul>
6.	Teman Sejawat	Memberikan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Konsultatif</li> <li>• Melakukan Audiensi</li> </ul>

## B. Strategi Marketing Sektor Publik

Strategi 7P + 1 C merupakan perluasan dari konsep 4P dalam pemasaran (Marketing Mix). Komponen-komponennya meliputi Produk (Product): Apa yang dijual, termasuk semua fitur, desain, dan kualitas. Harga (Price): Biaya bagi konsumen, termasuk diskon, rencana pembayaran, dan nilai yang dirasakan. Tempat (Place): Saluran distribusi, lokasi, dan logistik. Promosi

(Promotion): Iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan komunikasi pemasaran lainnya. Orang (People): Staf, layanan pelanggan, dan personel yang terlibat dalam proses. Proses (Process): Sistem dan prosedur yang menyampaikan produk atau layanan. Dan P yang ke-7 adalah Bukti Fisik (Physical Evidence): Aspek-aspek nyata yang membantu konsumen mengevaluasi produk sebelum pembelian. Dan 1C merujuk pada Customer (Pelanggan), menempatkan pelanggan di pusat strategi bisnis. Ini menekankan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan serta preferensi pelanggan, serta memastikan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Dengan menggabungkan kedua konsep ini, terciptastrategi yang komprehensif yang tidak hanya memperhatikan elemen-elemen dari bauran pemasaran tetapi juga memprioritaskan pengalaman dan kepuasan pelanggan. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa setiap aspek bisnis, mulai dari pengembangan produk hingga layanan pelanggan, selaras dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Strategi marketing 7P+1C dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Strategi marketing 7P+1C Proyek Perubahan

<b>Product</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bahan bacaan digital literasi keuangan berupa titik baca dan penambahan koleksi tematik di E-perpusMuara Enim</li> <li>• pelaksanaan kolaborasi harmonis berupa kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kampanye literasi digital keuangan terkait stop judi Online</li> <li>• Satgas Literasi anti Judi Online Dinas Perpustakaan</li> </ul>
<b>Place</b>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim
<b>Price</b>	Anggaran daerah (APBD Kabupaten Muara Enim), DAK Bidang Perpustakaan, CSR
<b>Promotion</b>	Sosialisasi edukasi, Kampanye literasi digital (Flyer, Video himbauan, pamflet, buku saku dll.) dengan pemanfaatan Artificial Intelligence (A.I) dengan memperhatikan segmentasi pasar. Jenis tema atau bahasa yang digunakan harus berbeda beda sesuai masing2 segmentasi (pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dll)
<b>People</b>	Staf perpustakaan dan kearsipan yang terlatih dalam teknologi digital dan pelayanan pelanggan, komunitas masyarakat (Komunitas Baca, Penulis, Blogger) Penggiat Literasi, Stakeholder holder (BI, IJK, OJK, POLRES, POL PP, INSPEKTORAT)
<b>Process</b>	Kolaborasi dengan semua stakeholders internal dan eksternal
<b>Physical evidence</b>	Platform titik baca, buku digital literasi keuangan, materi promosi (video himbauan, flyer, pamflet, dll) Evidendce pelaksanaan kolaborasi sosialisasi edukasi literasi Keuangan
<b>Customer</b>	Masyarakat (Mahasiswa, Pelajar, Perangkat Desa pengelola TPBIS) dan ASN

## **2.4 Identifikasi Potensi Risiko dan Solusinya**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada Tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelapor keuangan, pengamanan asset negara, dan ketatan terhadap peraturan perundang-undangan, Pada pasal 3 menyebutkan SPIP terdiri atas unsur.

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi dan
- e. Pemantauan pengendalian intern.

Dalam melaksanakan fungsi pengendalian intern, pimpinan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif, melakukan penilaian resiko, menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi organisasi, mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat serta melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pada kegiatan proyek perubahan ini potensi risiko dan pengendalian risiko disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Identifikasi Potensi Risiko dan Strategi Mengatasinya

NO	Potensi Masalah	Risiko	Strategi Mengatasinya
1.	Terlaksananya Forum Knowledge Sharing Literasi Ekonomi.	Tidak semua peserta mu merasa tertarik atau memiliki pengetahuan awal tentang literasi keuangan, terutama terkait judi online .	Menentukan audiens yang tepat untuk FGD ini, seperti pelajar, mahasiswa, karyawan, atau masyarakat umum.
2.	Terbentuknya tim kerja	Adanya beda Persepsi antar anggota Tim	Adakan komunikasi yang baik dan pendampingan dengan anggota Tim
3.	Tersedianya proses bisnis layanan AKSI KOMPAK.	Informasi tentang program mungkin tidak sampai ke audiens, pastikan materi diseminasi sampai ke audiens.	pembuatan materi yang jelas, menarik, dan relevan.
4.	Terbentuknya Sekretariat AKSI KOMPAK	Logo, motto, dan callcenter yang dipilih mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai organisasi atau bisa menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat.	Dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal.
5.	Tersusunnya buku saku literasi keuangan anti judi online.	Adanya kemungkinan tidak tertarik untuk membaca atau gagal memahami pentingnya literasi keuangan anti judi online.	Gunakan desain yang menarik dengan warna-warna yang mencolok dan tata letak yang modern untuk menarik perhatian pembaca.

6.	Terbentuknya kader sebagai PIC	Kader yang dipilih mungkin tidak memiliki kompetensi dalam program AKSI KOMPAK secara efektif.	Memberikan Pelatihan kepada calon PIC agar memahami materi terkait program AKSI KOMPAK
7.	Terlaksananya sosialisasi dan launching AKSI KOMPAK.	Peserta sosialisasi mungkin tidak memahami tujuan dan manfaat AKSI KOMPAK.	menyiapkan materi yang informatif dan menarik yang mudah dipahami.
8.	Terlaksananya asistensi kader AKSI KOMPAK	Kader mungkin kurang berkomitmen dalam program AKSI KOMPAK.	melibatkan kader dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa kepemilikan.
9.	Terimplementasinya AKSI KOMPAK.	keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan program.	Memberikan sosialisasi pelaksanaan program.

10.	Terlaksananya pendampingan dan supervisi bagi kader AKSI KOMPAK.	Kurangnya keterampilan dan pengetahuan kader AKSI KOMPAK	Adakan pelatihan Berkala untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kader.
11.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi AKSI KOMPAK.	Data yang dikumpulkan mungkin tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak relevan, yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi.	Libatkan stakeholder secara aktif melalui pertemuan, wawancara, atau survei.

## 2.5 Faktor Kunci Keberhasilan

Penanganan judi online memerlukan strategi yang komprehensif. Berikut adalah *faktor-faktor kunci keberhasilan* dalam penanganan judi online:

Faktor kunci keberhasilan dalam proyek perubahan ini ditentukan oleh beberapa hal:

1. Perencanaan yang matang, berupa rencana kerja yang detail dengan pencapaian target jangka pendek, menengah, dan panjang yang jelas.
2. Tim Kerja yang solid dan efektif, yaitu pembentukan tim kerja yang kompeten dan termotivasi, serta pembagian tugas yang jelas sesuai dengan keahlian masing-masing.
3. Dukungan infrastruktur, berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung komunikasi dan koordinasi tim.
4. Manajemen risiko yang proaktif, berupa identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya kendala yang tidak diinginkan.
5. Komunikasi yang efektif, yaitu berupa penerapan strategi komunikasi yang tepat untuk melibatkan seluruh *stakeholder*, baik internal maupun eksternal.
6. Kepemimpinan transformative, yaitu kemampuan pemimpin proyek perubahan dalam menginspirasi tim, mendorong inovasi, dan mengadaptasi terhadap perubahan.
7. Kolaborasi yang kuat, berupa pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan proyek perubahan yang lebih luas.

## **2.6 Rencana Mata Pelatihan Mendukung Proyek Perubahan**

### **Mata Pelatihan Pilihan Pendukung**

#### **1. Anti Narkoba**

Ada kesamaan dalam perlakuan kasus terhadap maraknya Narkoba dan Judi Online karena keduanya merupakan bentuk krim Alat dan kejahatan yang sedang tren dan angka kriminalitas dua bidang ini cukup tinggi seperti yang dirilis oleh data POLRI. Berbagai lesan learn dari mata pelatihan ini salah satunya misalnya Peningkatan angka Narkoba faktor utamanya

adalah rendahnya lingkungan mengantisipasi bahaya dini narkoba melalui peningkatan peran serta (partisipasi) lingkungan melakukan upaya pemberdayaan secara berdaya (sukarela dan mandiri), hal ini juga bisa diterapkan terhadap upaya pencegahan judi online secara preventif dengan melakukan kolaborasi dengan semua stakeholder termasuk lingkungan dan masyarakat.

## 2. Manajemen Pemerintahan

Mata pelatihan ini membantu project leader untuk Mampu mendefinisikan Manajemen Pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Sehingga dalam proyek perubahan juga bisa menerapkan konsep konsep teoritis manajemen dalam organisasi pemerintahan dan juga manajemen pemerintahan dalam era revolusi 4.0. Tentunya ini dalam menyikapi VUCA yang terjadi pada dunia saat ini.

## 3. GEDSI (Gender, Disability And Social Inclusion)

GEDSI dapat dipahami sebagai sebuah pola pikir (mindset), proses, dan hasil (outcome) yang memastikan bahwa tidak ada yang termarginalisasi dalam program pembangunan dan pelayanan publik (*no one left behind*). Mata pelatihan ini membekali project dengan kemampuan untuk memahami konsep GEDSI di institusi publik.

Tabel 15 Mata Pelatihan Mendukung Proyek Perubahan

No	Judul Proyek Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan ProyekPerubahan	Sumber Pembelajaran
1	Strategi Peningkatan Literasi Masyarakat Dalam Mendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui AKSI KOMPAK (Anti Judi Online terintegrasi dengan Kolaborasi Masyarakat Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim	Anti Narkoba	Pembelajaran Mandiri ( <i>Self-Learning</i> )	Ada kesamaan dalam perlakuan kasus terhadap maraknya Narkoba dan Judi Online karena keduanya merupakan bentuk krim Alatas dan kejahatan yang sedang tren dan angka kriminalitas dua bidang ini cukup tinggi seperti yang dirilis oleh data POLRI. Berbagai lesan learn dari mata pelatihan ini salah satunya misalnya Peningkatan angka Narkoba faktor utamanya adalah rendahnya lingkungan mengantisipasi bahaya dini narkoba melalui peningkatan peran serta (partisipasi) lingkungan melakukan upaya pemberdayaan secara berdaya (sukarela dan mandiri), hal ini juga bisa diterapkan terhadap upaya pencegahan judi online secara preventif dengan melakukan kolaborasi degan semua stakeholder termasuk lingkungan dan masyarakat.	Mata Pelatihan Dasar PKN Tk. II, LAN RI
		Manajemen Pemerintah-An	Pembelajaran Mandiri ( <i>Self-Learning</i> )	Mata pelatihan ini membantu project leader untuk Mampu mendefinisikan Manajemen Pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Sehingga dalam proyek perubahan juga bisa menerapkan konsep konsep teoritis manajemen dalam organisasi pemerintahan dan juga manajemen pemerintahan dalam era revolusi 4.0. Tentunya ini dalam menyikapi VUCA yang terjadi pada dunia saat ini.	Mata Pelatihan Dasar PKN Tk. II, LAN RI
		GEDSI (Gender, Disability And Social Inclusion)	Pembelajaran Mandiri ( <i>Self-Learning</i> )	GEDSI dapat dipahami sebagai sebuah pola pikir (mindset), proses, dan hasil (outcome) yang memastikan bahwa tidak ada yang termarginalisasi dalam program pembangunan dan pelayanan publik ( <i>no one left behind</i> ). Mata pelatihan ini membekali project dengan kemampuan untuk memahami konsep GEDSI di institusi publik.	Mata Pelatihan Dasar PKN Tk. II, LAN RI

## 2.7 Tata Kelola Proyek Perubahan

Identifikasi Kebutuhan Kompetensi :

1. Pentingnya pembuatan kebijakan sebagai payung hukum untuk melakukan kegiatan Peningkatan Literasi;
2. Perlunya pemahaman tentang bahaya Judi Online, Pinjol dan Investasi Bodong melalui kegiatan Peningkatan Literasi;
3. Dalam jangka Pendek perlu diadakan Gerakan Anti Judi Online Aksi Harmoni, Kolaborasi Masyarakat Pegiat, Dan Antar Kelembagaan (AKSI KOMPAK).

Rencana Pengembangan Kompetensi :

1. Penyediaan bahan bacaan digital literasi keuangan berupa titik baca dan penambahan koleksi tematik di “Medali” (Muara Enim Digital Library)
2. Kolaborasi, Edukasi berupa sosialisasi keuangan beserta kampanye literasi digital;
3. Pembentukan Satgas Literasi anti Judi Online Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim.

Evaluasi Kemajuan:

1. Melakukan penilaian progress Kegiatan AKSI KOMPAK;
2. Melakukan penilaian progress Peningkatan Minat Baca serta pemahaman masyarakat tentang bahaya Judi Online, Pinjol dan Investasi Bodong.

Proyek Perubahan merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kinerja organisasi agar organisasi menjadi lebih adaptif dan *agile* (lincah) dalam menghadapi setiap perubahan. Pelaksanaan proyek perubahan tidak terlepas dari tata kelola, sebab tata kelola yang baik berdampak pada hasil perubahan yang baik, begitu pula sebaliknya, tata kelola yang kurang baik menyebabkan kegagalan dalam membuat perubahan. Tata Kelola merupakan rangkaian proses yang mempengaruhi, mengarahkan, mengelola, dan mengontrol

suatu proyek perubahan pada organisasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola proyek perubahan ini adalah Mentor, Coach, Project Leader dan Tim Kerja. Tata kelola proyek perubahan merupakan hal sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan sekaligus memberikan jaminan kelancaran terlaksananya proyek perubahan. Tata kelola proyek perubahan berisi unsur-unsur yang terlibat yang bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Unsur-unsur tersebut ditempati oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian dan berpengaruh positif terhadap proyek perubahan.

Tabel 16. Tata Kelola Proyek Perubahan

Posisi	Tanggung jawab
Mentor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bimbingan dan arahan dalam merumuskan atau mengidentifikasi permasalahan yang krusial dalam organisasi terkait dengan implementasi proyek perubahan dengan gagasan AKSI KOMPAK,</li> <li>2. Membantu memetakan milestone yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan,</li> <li>3. Menjelaskan penyelesaian tugas dan memberikan kesepakatan serta persetujuan atas dokumen proposal proyek perubahan yang diajukan oleh project leader,</li> <li>4. Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam mengimplementasikan proyek perubahan,</li> <li>5. Memberikan dukungan pelibatan Perangkat Daerah, pejabat struktural dan staf dalam menyusun dan implementasi rancangan perubahan,</li> <li>6. Memberikan bimbingan dalam mengidentifikasi dan menemukan solusi permasalahan yang timbul,</li> <li>7. Memberikan dukungan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam implementasi proyek perubahan,</li> <li>8. Berperan sebagai inspirator dalam melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan.</li> </ol>
Coach	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi dan monitoring serta pengawasan dalam proses taking ownership dan laboratorium kepemimpinan,</li> <li>2. Memberikan dukungan dan bimbingan dalam merumuskan proyek perubahan dan sebagai inspiratory dalam mengatasi kendala-kendala yang tidak dapat diatasi oleh peserta dan bila diperlukan mengkoordinasikannya dengan mentor,</li> <li>3. Memberikan feedback terhadap kemajuan laporan implementasi yang disampaikan peserta sesuai yang dijadwalkan,</li> <li>4. Mengoreksi dan mengarahkan pemetaan agenda proyek perubahan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan,</li> <li>5. Menjadi consuler dalam menumbuhkan inovasi peserta dalam penyusunan dan pengimplementasian proyek perubahan AKSI KOMPAK.</li> </ol>

Project Leader	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan Proyek Perubahan Peningkatan Literasi Masyarakat melalui AKSI KOMPAK,</li> <li>2. Mempersiapkan dan merencanakan sebelum pertemuan dengan Mentor atau Coach,</li> <li>3. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan Mentor atau Coach,</li> <li>4. Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder terkait (internal maupun eksternal),</li> <li>5. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam milestone dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki,</li> <li>6. Secara aktif melakukan diskusi melaporkan kemajuan implementasi proyek perubahan kepada Mentor/Coach,</li> <li>7. Mengacu kepada rumusan milestone dalam dokumen pelaksanaan proyek sebagai dasar pencapaian target perubahan,</li> <li>8. Menggerakkan seluruh elemen stakeholder terkait (internal dan eksternal) dalam mendukung seluruh tahapan implementasi perubahan,</li> <li>9. Mengembangkan instrument monitoring dan melakukan perekaman setiap kemajuan implementasi proyek perubahan,</li> <li>10. Mengelola pendokumentasian kegiatan.</li> </ol>
Tim Kerja 1 (Sekreariat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan perencanaan penyusunan Proyek Perubahan,</li> <li>2. Memastikan efisiensi pembiayaan untuk proyek perubahan,</li> <li>3. Membuat dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan program yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan,</li> <li>4. Membuat Surat Keputusan tentang Susunan Tim Kerja Proyek Perubahan,</li> <li>5. Mempersiapkan surat-surat internal dan eksternal yang dibutuhkan dalam penyusunan proyek perubahan.</li> </ol>
Tim Kerja 2 (Satgas Literasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online terutama dampaknya terhadap kemiskinan dengan cara menyebarkan informasi bagaimana judi online dapat memperburuk kondisi ekonomi;</li> <li>2. Berperan dalam menggalakkan literasi digital di masyarakat dalam membantu masyarakat untuk lebih memahami risiko dan bahaya yang tersembunyi dibalik judi online. Dengan literasi digital yang baik masyarakat diharapkan mampu mengenali dan menghindari situs-situs judi online</li> <li>3. Bekerjasama dengan lembaga pemerintah, kepolisian, perguruan tinggi dan sekolah, pegiat literasi, majelis taklim untuk mengadakan <i>workshop</i>, <i>roadshow</i>, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang judi online dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.</li> <li>4. Memastikan bahwa informasi yang disebarkan masyarakat adalah akurat dan mudah dipahami;</li> <li>5. Mendorong masyarakat untuk mencari alternatif ekonomi yang lebih sehat, seperti usaha ekonomis produktif.</li> </ol>
Tim Kerja 3 (Pelaksana/Teknis)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan proyek perubahan yang sudah di rancang,</li> <li>2. Berkolaborasi dengan stakeholder dalam menjalankan proyek perubahan,</li> <li>3. Mengkoordinasikan dan Mengumpulkan data untuk kepentingan proyek perubahan.</li> </ol>
Tim Kerja 4 (Monitoring, Evaluasi, dan Membangun Keberlanjutan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan progres, kendala dan hasil dari pelaksanaan proyek perubahan;</li> <li>2. Memantau dan mengevaluasi jalannya pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan milestone/tahapan kegiatan yang telah ditetapkan;</li> <li>3. Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek perubahan;</li> <li>4. Mengukur pencapaian hasil pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;</li> <li>5. Menyusun rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan proyek perubahan;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Merancang dan menerapkan strategi untuk memastikan keberlanjutan dari hasil yang dicapai dalam pelaksanaan proyek perubahan;</li> <li>7. Mengembangkan kerjasama dan keterlibatan jangka panjang dengan <i>stakeholder</i> untuk komitmen terhadap keberlanjutan proyek perubahan.</li> </ol>
Tim Kerja 5 (Publikasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang strategi publikasi yang efektif untuk mengkomunikasikan tujuan, proses, dan hasil dari pelaksanaan proyek perubahan kepada audiens yang relevan;</li> <li>2. Menentukan target audiens yang spesifik baik internal maupun eksternal untuk setiap tahap publikasi ;</li> <li>3. Merancang pesan yang kreatif dan menarik agar pesan yang disampaikan mudah dipahami dan diterima oleh audiens;</li> <li>4. Menyebarkan informasi tentang pelaksanaan proyek perubahan melalui media yang dipilih; website resmi, <i>platform</i> media sosial, media massa, dan jaringan mitra;</li> <li>5. Mengelola akun media sosial terkait proyek perubahan termasuk membuat konten dan penjadwalan posting;</li> <li>6. Mengajak <i>stakeholder</i> untuk berpartisipasi aktif dalam publikasi dengan menyediakan testimoni, mendukung proyek perubahan dan berperan sebagai narasumber.</li> </ol>

Peran Tim Kerja dalam organisasi antar elemen-elemen kunci dalam tata kelola proyek perubahan secara skematik dapat dilihat pada gambar berikut ini.

## 2.8 Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan adalah proses identifikasi dan analisis terhadap berbagai karakteristik dan perilaku yang menunjukkan kemampuan kepemimpinan seseorang. Tujuannya adalah untuk memahami kekuatan dan kelemahan, serta kebutuhan pengembangan untuk mempersiapkan individu dalam menduduki posisi kepemimpinan yang lebih tinggi. Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan rencana strategi pengembangan potensi diri merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan merancang strategi untuk pengembangan keterampilan dan sikap yang relevan. Penjelasan mengenai rencana pengembangan potensi diri sebagai tindak lanjut dari self Assessment peserta sebagai berikut:

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA																																			
<b>Nama Peserta :</b>	H. SHOFYAN ARIPANCA, S.Kom., M.Si			<b>Nama Mentor :</b>	Ir. YULIUS, M.Si																														
<b>NIP :</b>	197201221997031003			<b>NIP :</b>	196707101993031010																														
<b>Jabatan :</b>	KEPALA DINAS			<b>Jabatan :</b>	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM																														
<b>Instansi :</b>	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MUARA ENIM			<b>Instansi :</b>	KABUPATEN MUARA ENIM																														
<b>Program :</b>	PKN TK II PROVINSI SUMSEL TAHUN 2024																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Nilai Komponen</th> </tr> <tr> <th>Sub Komponen Integritas</th> <th>Sub Komponen Kerjasama</th> <th>Sub Komponen Mengelola Perubahan</th> <th>Rata-Rata Total Sub Komponen</th> <th>Kualifikasi Total Sub</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peserta</td> <td>9,17</td> <td>9,00</td> <td>9,20</td> <td>9,12</td> </tr> <tr> <td>Mentor</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen</td> <td>9,05</td> <td>9,00</td> <td>9,06</td> <td>9,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Istimewa</td> <td>Istimewa</td> <td>Istimewa</td> <td>Istimewa</td> </tr> </tbody> </table>					Nilai Komponen					Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub	Peserta	9,17	9,00	9,20	9,12	Mentor	9,00	9,00	9,00	9,00	Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,05	9,00	9,06	9,04		Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa
Nilai Komponen																																			
Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub																															
Peserta	9,17	9,00	9,20	9,12																															
Mentor	9,00	9,00	9,00	9,00																															
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,05	9,00	9,06	9,04																															
	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa																															
<b>Keterangan Kualifikasi</b> 9.00-10 Istimewa 7.8.99 Baik 5.6.99 Cukup 3.4.99 Kurang 1.2.99 Sangat Kurang			<b>Akhir Sikap Perilaku</b> <b>9,04</b> <b>Kualifikasi:</b> <b>Istimewa</b>																																
<b>REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:</b>																																			
<b>Istimewa</b>	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi atau yang lebih menantang																																		
<b>Baik</b>	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama																																		
<b>Cukup</b>	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama																																		
<b>Kurang</b>	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama																																		
<b>Sangat Kurang</b>																																			
Di Setujui oleh Mentor  Ir. YULIUS, M.Si NIP. 196707101993031010																																			

Gambar 3. Rekap Sikap Prilaku Peserta

Langkah-langkahnya pemetaan sikap perilaku kepemimpinan meliputi

1. Pengumpulan data penilaian

Data ini berisi penilaian sikap perilaku dari peserta dan mentor yang diambil dari nilai pada komponen seperti integritas, kerjasama, dan mengelola perubahan.

2. Analisis Data

Membandingkan penilaian antara peserta dan mentor untuk mengidentifikasi perbedaan persepsi, dilihat dari gap penilaian antara peserta dengan mentor. Identifikasi area dengan nilai tinggi sebagai kekuatan dan area dengan nilai rendah sebagai kelemahan.

Perbedaan penilaian antara peserta dan mentor bisa digunakan sebagai dasar untuk memberikan *feedback* yang konstruktif kepada peserta. Mentor dapat membantu peserta memahami area di mana mereka perlu berkembang dan memberikan arahan yang spesifik. Mengidentifikasi perbedaan ini juga penting untuk merancang

program pengembangan yang lebih efektif, dengan fokus pada area yang memang membutuhkan perbaikan berdasarkan evaluasi mentor.

Penilaian sikap perilaku project leader antara peserta dan mentor ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 17 Strategi Pengembangan Kompetensi

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan		Cara pengembangan Kompetensi (klasikal/non klasikal)
	Aspek	Perilaku	
Tim Kerja 1 (Sekretariat)	Kerjasama	Kemampuan untuk menciptakan situasi kerja yang kondusif sehingga terjalin sinergitas antara <i>Project Leader</i> , tim kerja dan <i>stakeholder</i> ,	<i>Focus Group Discussion</i> , dan <i>Sharing Knowledge</i>
	Berkerja berorientasi hasil	Kemampuan tim kerja bekerja sesuai prosedur sehingga hasil yang didapatkan tepat secara efektif dan efisien	<i>In The House Training</i> , <i>On The Jib Training</i>
	Mengembangkan potensi diri dan orang lain	Kemampuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mampu menginspirasi orang lain	<i>Coaching</i> , <i>mentoring</i> , Menyusun program kerja bersama-sama
Tim Kerja 2 (Satgas Literasi)	Kerjasama	Kemampuan untuk menciptakan situasi kerja yang kondusif sehingga terjalin sinergitas antara <i>Project Leader</i> , tim kerja dan <i>stakeholder</i> .	<i>Focus Group Discussion</i> , dan <i>Sharing Knowledge</i>
	Kolaboratif	Kemampuan bekerja sama untuk mencapai hasil yang terbaik bagi Organisasi	<i>Focus Group Discussion</i> , dan <i>Sharing Knowledge</i>
	Akuntabel	Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi	<i>Focus Group Discussion</i> , dan <i>Sharing Knowledge</i>
	Kompetensi	Kemampuan	<i>Focus Group</i>

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan		Cara pengembangan Kompetensi (klasikal/non klasikal)
	Aspek	Perilaku	
		melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	<i>Discussion</i> , dan <i>Sharing Knowledge</i>
	Inovatif	Kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan Solusi bagi pemecahan masalah yang kompleks	<i>Focus Group Discussion</i> , dan <i>Sharing Knowledge</i>
Tim Kerja 3 (Teknis/Pelaksana)	Kolaboratif	Kemampuan bekerja sama untuk mencapai hasil yang terbaik bagi Organisasi	<i>Focus Group Discussion</i> , dan <i>Sharing Knowledge</i>
	Kompetensi	Kemampuan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	<i>Focus Group Discussion</i> , dan <i>Sharing Knowledge</i>
Tim Kerja 4 (Monitoring, Evaluasi, dan Membangun Keberlanjutan)	Akuntabel	Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi	<i>Focus Group Discussion</i> , dan <i>Sharing Knowledge</i>
	Kolaboratif	Kemampuan bekerja sama untuk mencapai hasil yang terbaik bagi Organisasi	<i>Focus Group Discussion</i> , dan <i>Sharing Knowledge</i>
Tim Kerja 5 (Publikasi)	Komunikasi efektif	Kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasive, menjelaskan informasi kompleks dengan cara yang mudah dipahami oleh audiens	<i>On The Job Training</i> , <i>sharing knowledge</i> , <i>self-learning</i>
	Penguasaan media social	Keahlian dalam menggunakan <i>platform</i> media social untuk menyebarkan informasi, dan mengelola interaksi dengan audiens	<i>On The Job Training</i> , <i>sharing knowledge</i> , <i>self-learning</i>

### BAB III

#### PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

#### 3.1 CAPAIAN PELAKSAAN PROYEK PERUBAHAN

Capaian tahapan proyek perubahan jangka pendek sesuai dengan milestone yang telah disusun tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 18. Capaian Tahapan Proyek Perubahan Jangka Pendek  
(Agustus – Oktober 2024)**

No	Milestone	Output Kunci	Waktu	Capaian	Evidence
1.	Melaksanakan Forum Knowledge Sharing Literasi Ekonomi.	1. Daftar hadir Peserta 2. Notulen 3. Dokumentasi	1 Minggu	100%	Lamp. 1
2.	Terbentuknya tim kerja	SK TIM Inovasi	1 Minggu	100%	
3.	Tersedianya proses bisnis layanan AKSI KOMPAK.	1. Proses Bisnis 2. Sosialisasi Bisnis	1 Minggu	100%	
4.	Terbentuknya Sekretariat AKSI KOMPAK	Melibatkan TIM Efektif didalam Mendesain Logo dan Motto	1 Minggu	100%	
5.	Tersusunnya buku saku literasi keuangan anti judi online.	1. Buku Saku 2. Liflet Judi Online	1 Minggu	100%	
6.	Terbentuknya kader sebagai PIC	1. SK TIM PIC 2. Sosialisasi Kampanye AKSI KOMPAK	1 Minggu	100%	
7.	Terlaksananya sosialisasi dan launching AKSI KOMPAK.	1. Daftar Hadir Sosialisasi 2. Dukungan dan Komitmen bersama AKSI KOMPAK	1 Minggu	100%	
8.	Terlaksananya asistensi kader AKSI KOMPAK	Pendampingan Peserta Materi	1 Minggu	100%	
9.	Terimplementasinya AKSI KOMPAK.	Himbauan ke peserta dari sekolah melalui Kader Duta Baca	1 Minggu	100%	

10.	Terlaksananya pendampingan dan supervisi bagi kader AKSI KOMPAK.	1. Pengisian Materi dari Kementerian Agama Larangan Judi Online  2. Pengisian Materi dari Polres Muara Enim Pencegahan Judi Online	1 Minggu	100%	
11.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi AKSI KOMPAK.	Pengecekan dalam Pemanfaatan Website Pelaper on AKSI KOMPAK	1 Minggu	100%	
12	Melaksanakan diseminasi AKSI KOMPAK.	1. Poster 2. Surat Kabar Online	1 Minggu	100%	

#### **A. Capaian Pelaksanaan Tahapan Jangka Pendek**

##### **1. Terlaksananya rakor teknis lintas pelaku atau sektor**



Gambar 4. Rapat Internal

## 2. Terbentuknya Tim Kerja Proyek Perubahan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim



**Gambar 6.** Penyerahan SK TIM Inovasi



## 3. Terlaksananya FGD AKSI KOMPAK bersama Pengelola Perpustakaan Sekolah



**Gambar 7.** Pelaksanaan FDG

#### 4. Tersusunnya Proses Bisnis dan Buku Saku AKSI KOMPAK



**Gambar 8.** Buku Saku Bisnis AKSI KOMPAK



**Gambar 9.** Sosialisasi Liflet dan Buku Saku AKSI KOMPAK

## 5. Terlaksananya Proses Bisnis dan Sosialisasi Bisnis ke Masyarakat di Desa

- DRAF PENYUSUNAN PROSES BISNIS "AKSI KOMPAK"**
- Proses bisnis anti-judi online bertujuan untuk mencegah dan mengatasi aktivitas perjudian ilegal di internet. Proses ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan lembaga keuangan untuk mendeteksi, mencegah, dan menghentikan aktivitas judi online yang dilarang. Berikut adalah beberapa langkah utama dalam proses bisnis anti-judi online:
- Pemantauan dan Deteksi**  
Sistem pemantauan digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau indikasi perjudian online. Teknologi pemantauan ini mencakup:
    - Analisis Konten Web:** Memeriksa situs web, aplikasi, dan forum online untuk konten yang berkaitan dengan perjudian.
    - Pemantauan Transaksi Keuangan:** Memeriksa transaksi yang mencurigakan yang mungkin terkait dengan aktivitas perjudian, seperti transfer yang besar atau berulang ke platform asing.
    - Analisis Perilaku Pengguna:** Mengidentifikasi pola perilaku pengguna yang sesuai dengan pola perjudi (frekuensi, jumlah transaksi, dsb.).
  - Blotir Akses ke Situs Judi**  
Setelah terdeteksi, situs atau aplikasi yang digunakan untuk perjudian bisa langsung diblokir. Hal ini dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan penyedia layanan internet. Blotir ini dapat mencakup:
    - Blotir Domain dan IP:** Memblokir akses ke situs web judi dengan memfilter domain atau IP.
    - Penghapusan Aplikasi dari Platform:** Meminta penyedia platform aplikasi (seperti Google Play atau App Store) untuk menghapus aplikasi perjudian dari akses publik.
  - Pemblokiran Transaksi Keuangan**  
Platform keuangan, seperti bank dan penyedia layanan pembayaran, dilibatkan untuk memblokir atau membatasi transaksi yang mencurigakan dan berhubung ke situs judi. Ini melibatkan:
    - Blotir Pembayaran:** Memeriksa transaksi yang menuju ke akun yang diketahui terkait dengan judi online.
    - Pemantauan dan Investigasi Lanjutan:** Meninjau dan menyelidiki transaksi mencurigakan lebih lanjut untuk tindakan yang diperlukan.
  - Edukasi dan Kampanye Publik**  
Edukasi masyarakat juga penting dalam membangun kesadaran akan bahaya judi online. Pemerintah atau organisasi anti-judi dapat melakukan:
    - Kampanye Sosial:** Menginformasikan bahaya dan dampak negatif judi online pada masyarakat.
    - Program Pendidikan:** Melalui media sosial, seminar, atau penyuluhan yang mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara menghindari dan melaporkan aktivitas perjudian ilegal.
  - Penegakan Hukum**  
Kerjasama antara pemerintah dan penegak hukum dilakukan untuk menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum. Proses ini bisa meliputi:
    - Penyidikan dan Pengumpulan Bukti:** Mengumpulkan bukti aktivitas perjudian online untuk penegakan hukum.
    - Penangkapan dan Tindakan Hukum:** Melakukan penangkapan dan membawa pelaku ke pengadilan sesuai peraturan yang berlaku.
  - Pemantauan Berkelanjutan**  
Karena perjudian online terus berkembang dengan teknik baru, pemerintah dan pihak terkait perlu mengadopsi teknologi terkini, seperti artificial intelligence (AI) dan machine learning, untuk pemantauan yang lebih adaptif.
- Proses ini membutuhkan koordinasi lintas sektor yang efektif agar dapat menekan angka perjudian online yang semakin marak.



**Gambar 10. Proses Bisnis dan Sosialisasi Bisnis AKSI KOMPAK**

## 6. Terlaksananya Sosialisasi AKSI KOMPAK



**Gambar 11. Sosialisasi AKSI KOMPAK ke Berbagai OPD dan Lembaga Eksternal**

## 7. Terlaksananya Launching AKSI KOMPAK dan Penandatanganan Komitmen Bersama



**Gambar 12.** Launching dan Penandatanganan Komitmen Bersama

## 8. Terlaksananya Implementasi AKSI Kompak kepada Siswa Sekolah melalui Kader Duta Baca Muara Enim



**Gambar 13.** Impelementasi AKSI KOMPAK kepada Siswa Sekolah

## 9. Terlaksananya pendampingan dan supervisi bagi kader AKSI KOMPAK



**Gambar 14.** Pendampingan Kader dengan Materi dari Kementerian Agama dan Kepolisian

## 10. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi AKSI KOMPAK melalui website AKSI KOMPAK Pelaper On



**Gambar 15.** Laman Website Layanan AKSI KOMPAK

## 11. Terlaksananya Diseminasi melalui Poster dan Media Online



**Gambar 16.** Diseminasi Poster dan Surat Kabar Online

### B. CAPAIAN HASIL PERUBAHAN TERHADAP RENCANA PERUBAHAN

#### a. Kondisi Sebelum

1. Belum tersedianya tools strategi terintegrasi pemberantasan judi online sebagai bagian dari literasi keuangan.
2. Belum ada kader Literasi anti Judi Online
3. Diseminasi berbasis literasi dengan sinergi antar lintas pelaku belum pernah dilakukan
4. Literasi Ekonomi SUMSEL 52,73 di bawah Rata-Rata NASIONAL 53,00
5. IPLM tahun 2023 Muara Enim : 62,21 Kategori Sedang Tingkat Nasioal & TGM tahun 2023 Muara Enim: 61,68 Kategori Tinggi di Prov. Sumsel

#### b. Kondisi Sesudah

1. Terlaksananya aksi kompak sebagai tools strategi terintegrasi pemberantasan judi online sebagai bagian dari literasi keuangan
2. Terbentuknya Kader AKSI KOMPAK sebagai kader literasi anti judi online
3. Tersedianya bahan bacaan digital literasi keuangan berupa titik baca dan penambahan koleksi tematik di E-Medali (Muara Enim Digital Library)
4. Terlaksananya Kolaborasi, Edukasi literasi anti judi online AKSI KOMPAK

## **6. MANFAAT LAYANAN AKSI KOMPAK**

### **1. Skala Nasional**

Proyek Perubahan AKSI KOMPAK mendukung peningkatan Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Gemar Membaca (TGM) serta Pencegahan Judi Online dengan meningkatkan Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan di E-Medali dan Titik Baca.

### **2. Skala Kabupaten**

Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik serta meningkatkan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim yakni meningkatkan minat baca.

### **3. Nilai Ekonomis**

Bagi organisasi nilai ekonomisnya adalah kegiatan AKSI KOMPAK berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan rutin yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim maupun kegiatan pusat sehingga tidak membutuhkan anggaran khusus untuk terlaksananya strategi AKSI KOMPAK. Selain itu juga kolaborasi antar kelembagaan berperan penting dalam efisiensi anggaran kegiatan AKSI KOMPAK melalui kerjasama dalam hal narasumber, kegiatan bersama, maupun publikasi AKSI KOMPAK. Manfaat yang diperoleh dari efisiensi anggaran ini adalah AKSI KOMPAK sudah tersosialisasikan kepada 1000 orang dan jika dikonversi dengan nominal anggaran kegiatan ini menghabiskan dana sebesar Rp. 59.375.000,-

Selanjutnya, dilaksanakannya Proyek Perubahan ini agar masyarakat sasaran Strategi AKSI KOMPAK dapat menambah pengetahuannya terkait bahaya judi online serta meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital melalui sosialisasi dan edukasi yg dilaksanakan dengan tidak berbayar alias gratis. Untuk itu masyarakat tidak perlu biaya untuk mendapatkan informasi tersebut.

### **3.2. Kepemimpinan Strategis**

#### **A. Optimalisasi Sumberdaya**

Pelaksanaan proyek perubahan ini, seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring hingga penyusunan laporan implementasi proyek perubahan. Perumusan tugas dan wewenang masing-masing SDM yang terlibat kemudian dituangkan dalam Surat keputusan yaitu Surat Keputusan Tim Efektif, Surat Keputusan PIC, dan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Inovasi Pemberantasan Judi Online yang dapat mendukung dan melaksanakan kegiatan AKSI KOMPAK.

1. Optimalisasi dan pengalokasian anggaran APBD, atau pemanfaatan anggaran lainnya. Pelaksanaan proyek perubahan Strategi AKSI KOMPAK, dilaksanakan dengan menggunakan APBD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim yang dianggarkan melalui APBD tahun 2025. Proyek perubahan ini menyesuaikan diri dengan program kegiatan yang biasa dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim Selain itu juga dengan berkolaborasi kegiatan dengan stakeholder terkait membuat proyek perubahan ini inovatif dan efisien.
2. Sumber daya Teknologi menggunakan alat Komputer, Internet dan Hanpone atau perangkat lainnya yang dapat digunakan untuk menjalankan proyek perubahan AKSI KOMPAK di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim

#### **B. Pemanfaatan Peluang**

##### **1. PELUANG**

- a. Adanya kebijakan peningkatan literasi untuk mendukung kesejahteraan  
Kebijakan peningkatan literasi untuk mendukung kesejahteraan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Literasi bukan hanya soal kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi digital, finansial, kesehatan dan sosial. Peningkatan literasi dapat membantu individu untuk membuat

keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, memahami informasi yang relevan, dan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Kebijakan yang mendukung peningkatan literasi bisa berupa program Pendidikan yang inklusif, pelatihan keterampilan, serta akses yang lebih luas terhadap teknologi dan informasi. Hal ini, jika dilaksanakan dengan baik, dapat berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

- b. Kebijakan literasi ekonomi terkait pemberantasan judi online merupakan prioritas program presiden Prabowo. Beliau menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang merata dan inklusif. Kebijakan literasi ekonomi ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi negara.

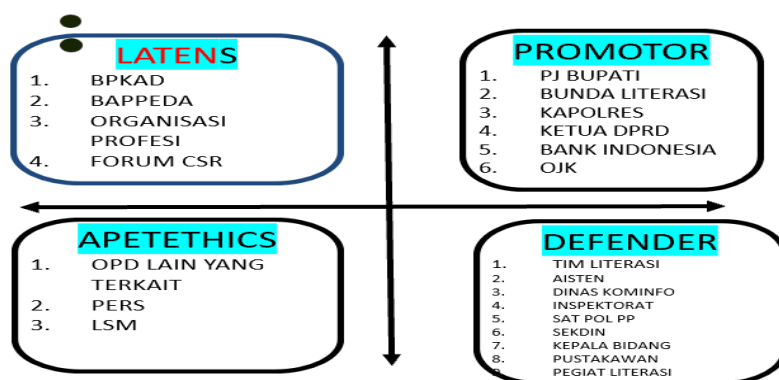
## **2. KENDALA**

1. Uji Coba kebermanfaat Website ini memerlukan waktu yang lama, masih perlunya sosialisasi dan himbauan terkait penggunaan Website karena bentuk promosi yang sering dilakukan akan lebih memperkenalkan Website atau hasil produk ke masyarakat lebih cepat.
2. Kurang stabil/meratanya jaringan internet. Jaringan dapat menjadi kendala akses internet yang lambat sehingga dalam Sistem informasi yang mempengaruhi layanan online membuat kendala yang berpengaruh untuk mengakses layanan AKSI KOMPAK.
3. Risiko Tutup Satu tumbuh seribu adalah suatu kondisi atau situasi dimana meskipun satu usaha atau kesempatan tertutup atau gagal, akan ada banyak peluang atau kesempatan lain yang muncul sebagai penggantinya. Ungkapan ini mengandung makna optimisme dan keyakinan bahwa kegagalan atau penutupan satu pintu bukanlah akhir, melainkan justru membuka kemungkinan baru yang lebih banyak.

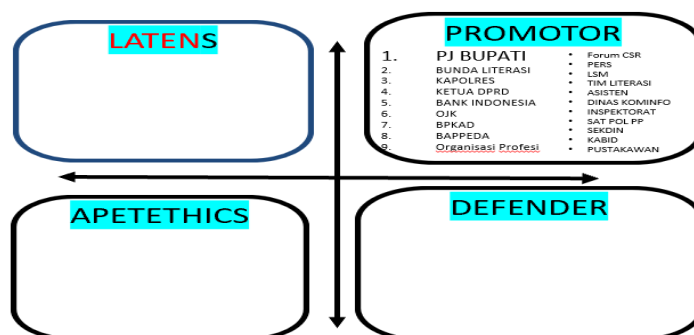
### 3.3 IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

#### 1. Peta Pergeseran Stakeholder

Peta Pergeseran Stakeholders Pelaksanaan Strategi Peningkatan Literasi Masyarakat dalam Mendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui AKSI KOMPAK (Anti Judi Online Terintegrasi dengan Kolaborasi Masyarakat) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim telah berhasil dilaksanakan sesuai timeline yang direncanakan pada jangka pendek. Selama tahapan ini telah banyak terjadi perubahan mindset dan pemahaman yang dimiliki oleh stakeholder terkait model AKSI KOMPAK. Beberapa pihak yang semula bersikap laten dan kurang meyakini bahwa strategi ini dapat diimplementasikan ataupun dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tercapainya tujuan dan target, kemudian berubah menjadi memberikan dukungan terhadap strategi ini. Berikut ini adalah perubahan peta stakeholder sebelum dan sesudah implementasi Strategi AKSI KOMPAK selama implementasi jangka pendek.



Gambar 16: Peta Stakeholder Sebelum Implementasi Proyek Perubahan



Gambar 17: Peta Stakeholder Sesudah Implementasi Proyek Perubahan

Peta Stakeholder Pergeseran sikap stakeholder ini ditandai dengan pemberian dukungan oleh para pihak yang bersikap latent, kemudian berperan menjadi promotor dengan bersedia memberikan dukungan baik secara tertulis ataupun dukungan saat pelaksanaan kegiatan selama masa implementasi proyek perubahan. Stakeholders lainnya bersedia memberikan dukungan secara tertulis maupun naratif, diantaranya: Pj, Bupati Muara Enim, Deputi Bidang Pengembangan Perpustakaan, Kepala Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Kepala Kementerian Agama Muara Enim. Selain itu peran pers dalam aphaetetics bergeser ke latens karena pers sesungguhnya perannya sangat penting sekali dalam dukungan proyek perubahan ini dalam hal diseminasi.

## **2. 4P (Product, Price, Promotion dan Place)**

Implementasi strategi marketing adalah proses pemilihan strategi yang dimasukkan ke dalam tindakan. Proses ini melibatkan desain dan pengelolaan sistem untuk mencapai integrasi terbaik dari orang, proses, sumber daya, distribusi, dan promosi yang dikembangkan untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan pelanggan bahwa produk atau jasa sudah ada di wilayah mereka. Agar proyek perubahan ini mendapatkan dukungan yang maksimal dari semua stakeholders, dan juga elemen masyarakat yang lain, maka telah dilakukan berbagai strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan yang dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sector public yaitu Product, Price, Place, dan Promotion (4P) yang diterjemahkan ke dalam langkah-langkah implementasi pemasaran yang disusun untuk keberhasilan proyek perubahan ini. Berikut ini adalah implementasinya selama pelaksanaan proyek perubahan:

a. Product

Produk dalam proyek perubahan ini adalah Strategi Peningkatan Literasi Masyarakat dalam Mendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui AKSI KOMPAK (Anti Judi Online Terintegrasi dengan Kolaborasi Masyarakat) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim dalam bentuk pengadaan bahan bacaan digital literasi keuangan berupa titik baca dan penambahan koleksi tematik di E-Medali pelaksanaan kolaborasi harmonis berupa kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kampanye literasi digital keuangan terkait stop judi Online, pembentukan Satgas Literasi anti Judi Online Dinas Perpustakaan.

b. Price

Price dalam proyek perubahan ini adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim. Proyek perubahan ini menyesuaikan diri dengan program kegiatan yang biasa dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim Selain itu juga dengan berkolaborasi kegiatan dengan stakeholder terkait membuat proyek perubahan ini inovatif dan efisien.

c. Place

Tempat Pelaksanaan Strategi Peningkatan Literasi Masyarakat dalam Mendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui AKSI KOMPAK (Anti Judi Online Terintegrasi dengan Kolaborasi Masyarakat) adalah di Kabupaten Muara Enim.

d. Promotion

Pada saat bersamaan promosi dilakukan melalui berbagai metode, media dan sarana yang dapat menunjang agar Strategi Peningkatan Literasi Masyarakat dalam Mendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui AKSI KOMPAK dapat diimplementasikan keseluruhan Kabupaten Muara Enim. Promosi yang dilakukan adalah menggunakan media social, media cetak berupa pamphlet, video edukasi dan lain-lain

### 3.4 Keberlanjutan Proyek Perubahan

#### 1. Dukungan dari Stakeholder Internal Maupun Eksternal

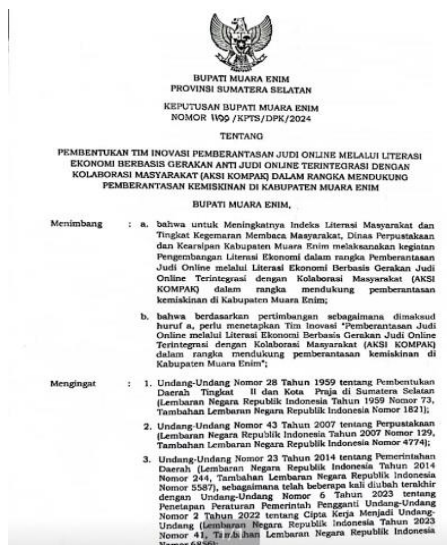
Dukungan dari Stakeholder Internal Maupun Eksternal Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim dalam Launching AKSI KOMPAK pada tanggal 3 Desember 2024 menegaskan bahwa strategi ini bukan sekedar proyek perubahan dalam rangka pemenuhan tugas sebagai peserta Diklat PKN II LAN RI Tahun 2024, tetapi merupakan strategi pengentasan kemiskinan serta pencegahan judi online dengan meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital yang akan diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Dukungan stakeholder lainnya mulai dari Pj Bupati Muara Enim, Perpustakaan Nasional, Kementerian Agama Muara Enim, Perguruan Tinggi, Kepolisian Daerah, Dinas Kabupaten Kota di Kabupaten Muara Enim, PIC TPBIS dan lainnya yang di tuangkan dalam SK Bupati Muara Enim tentang SK TIM AKSI KOMPAK. Berikut ini beberapa video dukungan agar strategi AKSI KOMPAK ini dapat terus dilakukan setelah berakhirnya masa Jangka Pendek proyek perubahan.



Gambar 18. Membangun Dukungan Pj. Bupati Muara Enim Terhadap Strategi AKSI KOMPAK



Gambar 19. Membangun Dukungan Deputy Perpustakaan Nasional RI Terhadap Strategi AKSI KOMPAK



Gambar 20. SK Bupati Tim Inovasi AKSI KOMPAK

## 2. Keterkaitan Strategi dengan SKP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim

Rencana tindak lanjut Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Literasi Masyarakat Dalam Mendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui AKSI KOMPAK (Anti Judi Online Terintegrasi dengan Kolaborasi Masyarakat) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim, meminta dukungan mentor, kemudian diinformasikan pada stakeholder terkait guna menambahkan peningkatan literasi masyarakat pada perjanjian kinerja Kepala Dinas, dan dituangkan dalam SKP Kepala Dinas, SKP Pejabat Administrator.

### 3.5 Pemberdayaan Organisasi Pembelajar:

#### a. Pemberdayaan organisasi pembelajar terhadap tim efektif

1. Pengembangan tim secara kolaboratif : Membangun budaya kerja sama yang baik, di mana setiap anggota tim dapat berkontribusi secara aktif.
2. Pendelegasian Tanggung Jawab : Setiap anggota tim memiliki kekuatan dan keahlian yang berbeda. Pengembangan kolaboratif berarti menugaskan tugas sesuai dengan keahlian individu, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih efisien

3. Orientasi pada hasil : Memberikan reward atau penghargaan atau pengakuan terhadap kinerja yang baik akan memotivasi tim untuk terus berusaha mencapai hasil yang optimal

**b. Pemberdayaan organisasi pembelajar terhadap stakeholder internal**

1. Memberikan Pelatihan : Pelatihan harus dilakukan secara berkala dan tidak hanya sekali. Program pembelajaran yang terstruktur memungkinkan peningkatan kemampuan secara bertahap dan konsisten. Selain itu pelatihan diperlukan untuk mengupdate pengetahuan terkait Literasi Keuangan dan Finansial agar terhindar dari Judi Online dan Investasi Bodong.
2. Mentoring : Setiap anggota tim internal mendapatkan bimbingan dari mentor yang lebih senior atau ahli di bidang layanan AKSI KOMPAK, Pendekatan ini memastikan bahwa setiap individu dalam tim memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana peran mereka berkontribusi pada keberhasilan proyek.
3. Focus Grup Discussion : Diskusi, terutama antara tim pokja. Memastikan bahwa semua aspek dari proyek perubahan secara teknis memiliki pemahaman kemampuan menganalisis kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan proyek perubahan.

**c. Pemberdayaan organisasi pembelajar terhadap stakeholder eksternal.**

1. Sosialisasi : Menyediakan materi proyek perubahan berupa buku panduan dan proses bisnis sehingga stakeholder eksternal dan penerima manfaat memiliki sumber informasi yang baik dan benar terkait proyek perubahan
2. Koordinasi kepada stakeholder terkait proyek perubahan : Koordinasi diperlukan dalam rangka meraih dukungan dan masukan dari stakeholder eksternal, serta menjawab pertanyaan mengenai proyek perubahan dan bagaimana langkah-langkah strategis dalam proyek perubahan AKSI KOMPAK.

3. Kolaborasi dan Elaborasi Berkelanjutan : Melalui kolaborasi dan elaborasi secara berkelanjutan, proyek perubahan dapat terus berjalan dan berkembang untuk mencapai tujuan, Sehingga akan mengurangi angka kemiskinan dari dampak dan bahaya Judi Online.

### **3.6 Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan**

#### **Mata Pelatihan Pilihan Pendukung**

1. Keterampilan Digital

Mata Pelatihan : Pemanfaatan dalam Penyusunan kebijakan karena ada peran teknologi dalam mendukung aksesibilitas, efektifitas dan efisiensi layanan AKSI KOMPAK.

2. Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)

Mata Pelatihan: GEDSI Jalur Pembelajaran: Pemberdayaan remaja sekolah/pelajar memberikan himbauan dan larangan dan dampak Judi Online yang dapat merusak Mental dan Keuangan Finansial.

3. Mata Pelatihan: Anti Judi Online

Jalur: Pembelajaran Pendampingan dengan Pihak Keagamaan dan Pihak Kepolisian agar mengetahui dampak apa saja yang dapat merusak semua aspek kehidupan apabila melakukan Judi Online, dan diharapkan pemanfaatan teknologi digunakan untuk pembelajaran sepanjang hayat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Pembelajaran Kepemimpinan**

Dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan proyek dapat diuraikan beberapa catatan proses pembelajaran (lesson learnt) dalam Kepemimpinan Strategis yang dialami dan dirasakan oleh Project Leader, yaitu:

1. Perencanaan yang Matang : pentingnya menyusun tujuan yang jelas, memahami sumber daya yang ada, serta merancang langkah-langkah konkret untuk mencapainya.
2. Komunikasi yang Efektif : pentingnya komunikasi yang jelas, terbuka, dan berkelanjutan untuk menjaga agar semua pihak terinformasi dan tetap bergerak ke arah tujuan yang sama.
3. Keterlibatan Stakeholder : Keterlibatan mereka dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek dan meminimalkan resistensi terhadap perubahan.

#### **4.2 Kesimpulan**

1. Proyek perubahan ini dirancang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim untuk memberikan Literasi Ekonomi akan pentingnya pemanfaatan Media Online yang baik dengan menggunakan layanan Buku Online yang tersedia di dalam aplikasi MEDALI untuk peningkatan Literasi Ekonomi dan Finansial di kalangan Masyarakat agar nilai IPLM dan TGM Kabupaten Muara Enim meningkat.
2. solusi berkelanjutan dalam menangani masalah Judi Online dengan melalui pendekatan dan sosialisasi terhadap dampak dan kerugian yang dialami dari Judi Online. Dengan sistem yang terintegrasi antara layanan konvensional tatap muka dan layanan berbasis teknologi, proyek ini mampu menjangkau lebih banyak individu dan memberikan solusi yang lebih efisien serta relevan dengan perkembangan zaman.

3. Selain itu, kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Masyarakat, komunitas, dan Lembaga eksternal dan pendidik dalam menjangkau semua aspek menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa akses Judi Online terhadap kesehatan angka kemiskinan dapat ditanggulangi dengan banyak membaca dan mengakses layanan buku online yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Muara Enim.

## **2. Rekomendasi**

1. Stakeholder Internal : memastikan keberlanjutan layanan AKSI KOMPAK agar dapat terus berlaksana dan memperluas ke Masyarakat
2. Stakeholder Eksternal : membangun komitmen kolaborasi pelaksanaan layanan AKSI KOMPAK sebagai tujuan bersama dalam mencapai kinerja
3. Swasta : Sponsoring dana dalam penyebarluasan informasi pemberantasan Judi Online
4. Remaja dan Masyarakat : Remaja perlu didorong dalam menghindari Judi Online dan menjauhi dampak dari Judi Online

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang *Perpustakaan*. Undang  
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi  
Birokrasi 2010–2025*.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Perubahan atas  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi  
Birokrasi 2020 – 2024*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2019 *tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2021 *tentang  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13  
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 – 2024*.
- Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 – 2024.